



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TA  
2023

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Kota Banjarbaru yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dimana informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, disamping itu dalam laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam hal pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarbaru, Februari 2024  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru,



**Drs. ABDUL BASID, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700915 199101 1 001

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3    Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
BAB II.....	8
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	8
2.1    Kebijakan Keuangan .....	8
2.2    Kebijakan Pendapatan Daerah.....	9
2.3    Pencapaian Target Kinerja APBD .....	10
BAB III.....	13
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	13
3.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	13
3.2    Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan .....	13
BAB IV.....	14
KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	14
4.1    Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan .....	14
4.2    Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
4.3    Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
4.4    Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.....	24
BAB V .....	26
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	26
5.1    LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	26
5.2    LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	48
5.3    NERACA .....	49
5.4    LAPORAN OPERASIONAL .....	75
5.5    LAPORAN ARUS KAS.....	87
5.6    LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	91
BAB VI.....	94
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	94
BAB VII.....	95
PENUTUP.....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan .....	8
Tabel 2 Anggaran Belanja Dinas Perhubungan .....	8
Tabel 3 Anggaran Belanja UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor.....	9
Tabel 4 Anggaran Belanja UPT. Pengelolaan Perpajakan .....	9
Tabel 5 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan .....	10
Tabel 6 Realisasi Anggaran UPT. Pengelolaan Perpajakan .....	11
Tabel 7 Realisasi Anggaran UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor.....	12
Tabel 8 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022.....	26
Tabel 9 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	26
Tabel 10 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	27
Tabel 11 Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum.....	27
Tabel 12 Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha.....	28
Tabel 13 Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu.....	28
Tabel 14 Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	29
Tabel 15 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan 2022.....	29
Tabel 16 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Perhubungan .....	30
Tabel 17 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perhubungan .....	30
Tabel 18 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Perhubungan .....	31
Tabel 19 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Perhubungan .....	32
Tabel 20 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah Dinas Perhubungan .....	32
Tabel 21 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan .....	32
Tabel 22 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan.....	33
Tabel 23 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan.....	34
Tabel 24 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan.....	34
Tabel 25 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Dinas Perhubungan.....	34
Tabel 26 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja UPT. Pengelolaan Perpajakan tahun 2023 dan 2022.....	35
Tabel 27 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi (UPT. Perpajakan) .....	35
Tabel 28 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai UPT. Pengelolaan Perpajakan .....	36
Tabel 29 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa UPT. Pengelolaan Perpajakan .....	36
Tabel 30 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal UPT. Pengelolaan Perpajakan .....	37
Tabel 31 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah UPT. Pengelolaan Perpajakan.....	37
Tabel 32 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin UPT. Pengelolaan Perpajakan.....	38
Tabel 33 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan.....	39
Tabel 34 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan.....	39
Tabel 35 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan.....	40
Tabel 36 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Dinas Perhubungan.....	40
Tabel 37 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja UPT. PKB .....	40
Tabel 38 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi UPT. PKB.....	41
Tabel 39 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa UPT. PKB.....	41
Tabel 40 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor.....	42
Tabel 41 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah UPT. Pengelolaan Perpajakan.....	42
Tabel 42 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin UPT. Pengelolaan Perpajakan.....	42

Tabel 43 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan.....	44
Tabel 44 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan.....	44
Tabel 45 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan.....	44
Tabel 46 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Dinas Perhubungan.....	45
Tabel 47 Tabel Surplus/Defisit LRA Dinas Perhubungan .....	45
Tabel 48 Tabel Rincian Surplus/Defisit LRA Dinas Perhubungan.....	45
Tabel 49 Tabel Surplus/Defisit LRA UPT. Pengelolaan Perparkiran .....	45
Tabel 50 Tabel Rincian Surplus/Defisit LRA UPT. Pengelolaan Perparkiran.....	45
Tabel 51 Tabel Surplus/Defisit LRA UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor .....	46
Tabel 52 Tabel Rincian Surplus/Defisit LRA UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.....	46
Tabel 53 Tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dinas Perhubungan .....	46
Tabel 54 Tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) UPT. Perparkiran .....	47
Tabel 55 Tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) UPT. PKB.....	47
Tabel 56 Tabel Aset Lancar Dinas Perhubungan .....	49
Tabel 57 Mutasi Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum TA 2023 dan 2022 .....	50
Tabel 58 Mutasi Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2023 dan 2022 .....	50
Tabel 59 Tabel Penyisihan Piutang .....	50
Tabel 60 Tabel Persediaan Dinas Perhubungan.....	51
Tabel 61 Tabel Aset Lancar UPT. Perparkiran .....	51
Tabel 62 Tabel Persediaan UPT. Perparkiran .....	51
Tabel 63 Tabel Aset Lancar UPT. PKB.....	52
Tabel 64 Tabel Persediaan UPT. PKB .....	52
Tabel 65 Tabel Aset Tetap Dinas Perhubungan.....	53
Tabel 66 Tabel Rincian Tanah Dinas Perhubungan .....	53
Tabel 67 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan .....	54
Tabel 68 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	54
Tabel 69 Rincian Peambahan Aset Karena Hibah .....	58
Tabel 70 Rincian Penambahan Aset Karena Mutasi Antar SKPD.....	58
Tabel 71 Rincian Pengurangan Aset Karena Reklas Belanja Persediaan.....	59
Tabel 72 Rincian Pengurangan Aset Karena Ekstracomtabel .....	59
Tabel 73 Rincian Pengurangan Aset Karena Mutasi Antar SKPD .....	60
Tabel 74 Rincian Pengurangan Aset Karena Reklasifikasi.....	60
Tabel 75 Tabel Rincian Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan .....	61
Tabel 76 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal .....	61
Tabel 77 Rincian Pengurangan Aset Karena Reklasifikasi ke Barang dan Jasa.....	62
Tabel 78 Rincian Pengurangan Aset Karena Mutasi Antar SKPD .....	62
Tabel 79 Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan .....	62
Tabel 80 Rincian Penambahan Aset Karena Reklasifikasi.....	62
Tabel 81 Rincian Akumulasi Penyusutan Dinas Perhubungan.....	63
Tabel 82 Tabel Rincian Aset Tetap UPT. Perparkiran .....	63
Tabel 83 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin UPT. Perparkiran.....	64
Tabel 84 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal .....	64
Tabel 85 Rincian Pengurangan Aset Karena Ekstracomtable .....	66
Tabel 86 Tabel Rincian Gedung dan Bangunan UPT. Perparkiran .....	66

Tabel 87 Rincian Akumulasi Penyusutan UPT. Perparkiran .....	67
Tabel 88 Tabel Rincian Aset Tetap UPT. PKB.....	67
Tabel 89 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin UPT. PKB.....	68
Tabel 90 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal .....	68
Tabel 91 Tabel Rincian Gedung dan Bangunan UPT. PKB.....	68
Tabel 92 Rincian Penambahan Aset Karena Mutasi Antar SKPD .....	69
Tabel 93 Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap UPT. PKB.....	69
Tabel 94 Tabel Rincian Aset Lainnya UPT. Perparkiran .....	70
Tabel 95 Rincian Aset Tidak Berwujud UPT. Perparkiran .....	70
Tabel 96 Tabel Amortisasi Aset Tidak Berwujud UPT. Perparkiran .....	70
Tabel 97 Tabel Rincian Aset Lainnya UPT. PKB .....	71
Tabel 98 Rincian Aset Tidak Berwujud UPT. PKB .....	71
Tabel 99 Tabel Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud UPT. PKB .....	71
Tabel 100 Tabel Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perhubungan .....	72
Tabel 101 Tabel Pendapatan Diterima Dimuka .....	72
Tabel 102 Tabel Utang Beban.....	72
Tabel 103 Tabel Rincian Utang Beban .....	73
Tabel 104 Tabel Ekuitas Dinas Perhubungan .....	73
Tabel 105 Tabel Ekuitas UPT Pengelolaan Perparkiran .....	74
Tabel 106 Tabel Ekuitas UPT. PKB.....	74
Tabel 107 Pendapatan LO .....	75
Tabel 108 Rincian Pendapatan LO .....	75
Tabel 109 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO .....	75
Tabel 110 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO.....	76
Tabel 111 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO .....	76
Tabel 112 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	76
Tabel 113 Rincian Pendapatan Hibah-LO.....	77
Tabel 114 Tabel Beban LO Dinas Perhubungan .....	77
Tabel 115 Rincian Beban Operasi Dinas Perhubungan .....	78
Tabel 116 Rincian Beban Pegawai Dinas Perhubungan .....	78
Tabel 117 Rincian Beban Pegawai Dinas Perhubungan .....	78
Tabel 118 Beban Persediaan Dinas Perhubungan.....	79
Tabel 119 Rincian Beban Persediaan Dinas Perhubungan .....	79
Tabel 120 Beban Jasa Dinas Perhubungan.....	79
Tabel 121 Rincian Beban Jasa Dinas Perhubungan .....	80
Tabel 122 Beban Pemeliharaan Dinas Perhubungan .....	80
Tabel 123 Beban Perjalanan Dinas Perhubungan .....	80
Tabel 124 Rincian Beban Penyisihan Piutang .....	80
Tabel 125 Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perhubungan .....	81
Tabel 126 Beban Operasi UPT. Perparkiran .....	81
Tabel 127 Rincian Beban Operasi UPT. Perparkiran.....	81
Tabel 128 Rincian Beban Pegawai UPT. Perparkiran.....	82
Tabel 129 Beban Persediaan UPT. Perparkiran.....	82
Tabel 130 Rincian Beban Persediaan UPT. Perparkiran .....	82

Tabel 131 Beban Jasa UPT. Perparkiran.....	83
Tabel 132 Beban Perjalanan Dinas UPT. Perparkiran.....	83
Tabel 133 Beban Penyusutan dan Amortisasi UPT. Perparkiran .....	83
Tabel 134 Beban Operasi UPT. PKB .....	84
Tabel 135 Rincian Beban Operasi UPT. PKB.....	84
Tabel 136 Beban Persediaan UPT. PKB .....	84
Tabel 137 Rincian Beban Persediaan UPT. PKB.....	84
Tabel 138 Beban Jasa UPT. PKB .....	85
Tabel 139 Beban Pemeliharaan UPT. PKB.....	85
Tabel 140 Beban Perjalanan Dinas UPT. PKB .....	85
Tabel 141 Beban Penyusutan dan Amortisasi UPT. PKB .....	85
Tabel 142 Surplus/Defisit-LO Dinas Perhubungan .....	86
Tabel 143 Surplus/Defisit-LO UPT. Perparkiran .....	86
Tabel 144 Surplus/Defisit-LO UPT. PKB.....	86
Tabel 145 Arus Kas Masuk Dinas Perhubungan .....	87
Tabel 146 Arus Kas Keluar Dinas Perhubungan .....	87
Tabel 147 Arus Kas Keluar UPT Perparkiran.....	87
Tabel 148 Arus Kas Keluar UPT Pengujian Kendaraan Bermotor .....	87
Tabel 149 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi .....	88
Tabel 150 Arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Dinas Perhubungan.....	88
Tabel 151 Arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan UPT Perparkiran.....	89
Tabel 152 Arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan UPT PKB .....	89
Tabel 153 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERHUBUNGAN .....	91
Tabel 154 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UPT.PERPARKIRAN.....	92
Tabel 155 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UPT.PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.....	93



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota *Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.*

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur – unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari ;

**A. Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat mempunyai *tugas pokok* menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi ;

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 2) Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

isyarat lalu lintas di jalan;

- 3) Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

**C. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi**

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan rasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;
- 2) Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.
- 3) Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- 4) Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

**D. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Unit pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari:

a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;
  - 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
  - 3) Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.
  - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**E. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PERHUBUNGAN

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai peran dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang perhubungan di lingkup Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2023.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tetapi juga menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi berupa realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas serta basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran;



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PERHUBUNGAN

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- b. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, yang berasal dari pungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
- p. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
- q. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50).



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

- BAB I Pendahuluan
  - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
  
- BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
  - 2.1 Kebijakan Keuangan
  - 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
  
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
  - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
  
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
    - 5.1.1 Pendapatan-LRA
    - 5.1.2 Belanja
    - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
    - 5.1.4 Pembiayaan
    - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
  
  - 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
    - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
    - 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
    - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
  
  - 5.3 NERACA
    - 5.3.1 Aset Lancar
    - 5.3.2 Aset Tetap
    - 5.3.3 Aset Lainnya
    - 5.3.4 Kewajiban
    - 5.3.5 Ekuitas Dana



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

- 5.4.1 Pendapatan-LO
- 5.4.2 Beban
- 5.4.3 Surplus/Defisit-LO

5.5 LAPORAN ARUS KAS

- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5 Kenaikan/penurunan Bersih Kas

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
- 5.6.3 Koreksi-Koreksi
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**BAB II**

**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Kebijakan Keuangan**

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Kebijakan keuangan SKPD, meliputi :

a) Kebijakan peningkatan pendapatan.

Peningkatan anggaran pendapatan dipengaruhi oleh permintaan peningkatan infrastruktur dari masyarakat Kota Banjarbaru, dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan Kota Banjarbaru. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket.
1	Pendapatan Retribusi Daerah	3.120.500.000,00	2.738.117.732,00	87,75%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.120.500.000,00</b>	<b>2.738.117.732,00</b>	<b>87,75%</b>

b) Efisiensi dan efektivitas belanja dan penentuan sumber penggunaan pembiayaan.

Kebijakan keuangan dalam anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Perhubungan, UPT PKB, dan UPT Perparkiran selama satu periode (Tahun 2023), tingkat pencapaiannya 74,31% dari nilai anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi keuangan ini secara umum dapat dikatakan efisien diukur dari penggunaan anggaran.

Dalam Tahun 2023, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melakukan kebijakan anggaran belanja, sebagai berikut:

**Tabel 2 Anggaran Belanja Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket.
1	Belanja Operasi	13.295.364.520,00	10.291.214.927,00	77,40%
2	Belanja Modal	3.409.971.375,00	2.231.344.175,00	65,44%
	<b>Jumlah</b>	<b>16.705.335.895,00</b>	<b>12.522.559.102,00</b>	<b>74,96%</b>





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

UPT Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor

**Tabel 3 Anggaran Belanja UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket.
1	Belanja Operasi	449.474.000,00	307.645.162,00	68,45%
2	Belanja Modal	176.070.000,00	175.530.000,00	99,69%
	<b>Jumlah</b>	<b>625.544.000,00</b>	<b>483.175.162,00</b>	<b>77,24%</b>

UPT Pengelolaan Perparkiran

**Tabel 4 Anggaran Belanja UPT. Pengelolaan Perparkiran**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket.
1	Belanja Operasi	2.500.260.500,00	2.041.756.058,00	81,66%
2	Belanja Modal	192.000.000,00	188.132.925,00	97,99%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.692.260.500,00</b>	<b>2.229.888.983,00</b>	<b>82,83%</b>

## **2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan yang ditempuh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, terutama yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Optimalisasi penerimaan PAD terus dilakukan yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya, yaitu dengan cara: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- Mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada bidang terkait dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- b. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah kegiatan pemerintah kota untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkan target capaian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini :

#### Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

**Tabel 5 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	23.644.825	94,58
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.280.000	71.007.600	88,45
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.240.259.950	4.162.602.639	98,19
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.999.900	29.544.950	98,48
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.250.000	13.225.500	99,82
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	276.504.000	250.385.850	90,55
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.872.400	35.677.900	99,46
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.134.000	200.962.800	93,41
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.900.000	39.206.750	98,26
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.998.000	1.995.000	99,85
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.808.000	201.081.145	98,18
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000	468.700.000	96,38
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.135.000.000	972.100.000	85,65
14	Pengadaan Mebel	49.920.000	14.450.000	28,95
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.846.000	140.918.975	98,65
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.800.000	129.137.047	51,29
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.396.620	68.341.366	29,41
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>			



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

	Pemerintahan Daerah			
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.991.000	21.867.300	57,56
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.052.300	253.040.300	70,87
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.940.000	31.340.000	98,12
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.080.000	218.865.200	99,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>			
22	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	887.334.225	302.254.600	34,06
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.416.463.000	254.883.575	17,99
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>			
24	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	340.209.600	314.739.480	92,51
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>			
25	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	125.548.750	114.324.250	91,06
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	136.343.250	135.225.400	99,18
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
27	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.650.105.400	4.053.036.650	71,73
28	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.993.500	-	-
	<b>Total</b>	<b>16.705.335.895</b>	<b>12.522.559.102</b>	<b>74,97</b>

**UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**Tabel 6 Realisasi Anggaran UPT. Pengelolaan Perparkiran**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>			
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.993.899.500	1.717.142.433	86,12
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	698.361.000	512.746.550	73,42
	<b>Total</b>	<b>2.692.260.500</b>	<b>2.229.888.983</b>	<b>82,83</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**Tabel 7 Realisasi Anggaran UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
	<b>Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor</b>			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor	211.070.000	175.530.000	83,16
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	105.520.000	42.000.000	39,80
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor	124.016.000	109.770.000	88,51
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	152.408.000	137.980.000	90,53
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor	24.180.000	17.055.162	70,53
6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor	8.350.000	840.000	10,06
	<b>Total</b>	<b>625.544.000</b>	<b>483.175.162</b>	<b>77,24</b>

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.



### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

##### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mengalokasikan pendapatan sebesar Rp.3.120.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.738.117.732,00 atau sebesar 87,75%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.1.778.877.419,00 realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.959.240.313 atau sebesar 53,92% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mengalokasikan sebesar Rp.16.705.335.895,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.522.559.102,00 atau sebesar 74,96%. UPT Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor mengalokasikan sebesar Rp.625.544.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.483.175.162,00 atau sebesar 77,24%. Dan UPT Pengelolaan Perparkiran mengalokasikan sebesar Rp.2.692.260.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.229.888.983,00 atau sebesar 82,83%.

##### **3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan**

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan realisasi anggaran belanja adalah terlambatnya penetapan APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan khususnya yang terkait dengan Perubahan APBD sangat terbatas yang berakibat terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini akan menjadi perhatian dan diharapkan dimasa yang akan datang perubahan anggaran dapat dilaksanakan lebih awal sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan di SKPD-SKPD.

Selain kendala diatas ada pula kendala internal sebagai berikut :

- a. Bidang sumber daya manusia.
  - Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai
  - Kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan
  - Budaya “pesimis” yang sudah berakar dimasyarakat.
- b. Bidang administrasi
  - Kurangnya ketaatan terhadap sistem yang berlaku.
  - Pelaksanaan birokrasi yang berbelit-belit sehingga dapat menghambat kelancaran pekerjaan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

### 4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

### 4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PERHUBUNGAN

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

#### 4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

#### 4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

##### 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

##### 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.





# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
- a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b) Penghapusbukuan (*write down*)  
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).  
Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
    - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
    - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
    - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
  - c) Penghapustagihan (*write off*)  
Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.  
Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:
    - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
    - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
    - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan  
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi  
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

#### **4.3.7 Pengukuran Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian  
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri  
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan  
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **4.3.8 Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

- a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

- b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

- c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

#### **4.3.9 Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

#### **4.3.10 Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembalian keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

#### **4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### **4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

1. Tagihan Jangka Panjang.
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
  - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
  - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.
4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

### 4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
  - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

#### **4.3.14 Pengukuran Ekuitas**

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Deposito LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Deposito –LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang
  - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

## 2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

### 4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.





# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### BAB V

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

##### 5.1.1 Pendapatan-LRA

31 Desember 2023

(Rp)

2.738.117.732,00

31 Desember 2022

(Rp)

1.778.877.419,00

Tabel 8 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	3.120.500.000,00	2.730.866.586,00	87,51	1.777.934.919,00
2	Pendapatan Transfer	0	0	0	0
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	7.251.146,00	0	942.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.120.500.000,00</b>	<b>2.738.117.732,00</b>	<b>87,75</b>	<b>1.778.877.419,00</b>

##### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2023

(Rp)

2.738.117.732,00

31 Desember 2022

(Rp)

1.778.877.419,00

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru memiliki Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dirincikan pada table berikut:

Tabel 9 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Pajak Daerah	0	0	0
2	Retribusi Daerah	3.120.500.000,00	2.730.866.586,00	87,51
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0	0	0
4	Lain-Lain PAD yang Sah	0	7.251.146,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>3.120.500.000,00</b>	<b>2.738.117.732,00</b>	<b>87,75</b>

##### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**  
**0**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**  
**0**

**5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**  
**2.738.117.732,00**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**  
**1.777.934.919,00**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari 3 Jenis Pendapatan Retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang dituang dalam rincian table berikut:

**Tabel 10 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	1.445.500.000,00	944.829.000,00	65,36
2	Retribusi Jasa Usaha	1.643.110.000,00	1.775.129.586,00	108,03
3	Retribusi Perizinan Tertentu	31.890.000,00	10.908.000,00	34,21
<b>TOTAL</b>		<b>3.120.500.000,00</b>	<b>2.730.866.586,00</b>	<b>87,51</b>

**5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum**

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**  
**944.829.000,00**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**  
**999.872.500,00**

Pendapatan Asli Daerah Retribusi Jasa Umum Pada Dinas Perhubungan terdiri dari 2 Retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 11 Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	0	0	0
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	660.000.000,00	409.359.000,00	62,02
4	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0	0	0
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	785.500.000,00	535.470.000,00	68,17
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.445.500.000,00</b>	<b>944.829.000,00</b>	<b>65,36</b>



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2023

(Rp)

1.775.129.586,00

31 Desember 2022

(Rp)

770.540.419,00

Pendapatan Asli Daerah Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Perhubungan terdiri dari 2 Retribusi, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Untuk rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 12 Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	0	0
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	20.065.000,00	47.685.000,00	237,65
3	Retribusi Terminal Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	0	0	0
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.623.045.000,00	1.727.444.586,00	106,43
5	Retribusi Tempat Pariwisata	0	0	0
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.643.110.000,00</b>	<b>1.775.129.586,00</b>	<b>108,03</b>

### 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2023

(Rp)

10.908.000,00

31 Desember 2022

(Rp)

7.522.000,00

Pendapatan Asli Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Pada Dinas Perhubungan terdiri dari 1 Retribusi, yaitu Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan. Untuk rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 13 Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi	0	0	0
3	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan	0	0	0
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	31.890.000,00	10.908.000,00	34,21
<b>TOTAL</b>		<b>31.890.000,00</b>	<b>10.908.000,00</b>	<b>34,21</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**0,00**

**0,00**

**5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Dinas Perhubungan yaitu Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Untuk rincian dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 14 Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran TA 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Penerimaan Jasa Giro	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0	0	0
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0
4	Pendapatan Denda Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Dari Pengembalian	0	0	0
6	Pendapatan BLUD	0	0	0
7	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	0	0	0
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0	0	0
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	7.251.146,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>7.251.146,00</b>	<b>0</b>

**5.1.2 Belanja**

Belanja Pada Dinas Perhubungan dan UPT terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal, yang akan dirincikan pada penjelasan berikut:

**5.1.2.1 Belanja Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**12.522.559.102,00**

**10.224.081.432,00**

**Tabel 15 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan 2022**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran TA 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi TA 2022 (Rp)</b>
1	Belanja Operasi	13.295.364.520,00	10.291.214.927,00	77,40	9.083.232.051,00
2	Belanja Modal	3.409.971.375,00	2.231.344.175,00	65,44	1.140.849.381,00
3	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16.705.335.895,00</b>	<b>12.522.559.102,00</b>	<b>74,96</b>	<b>10.224.081.432,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.1.1 Belanja Operasi Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**10.291.214.927,00**

**9.083.232.051,00**

Belanja Operasi Dinas Perhubungan terdiri dari 2, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan tingkat realisasi sebesar 77,40% dari anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di table berikut:

**Tabel 16 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.303.019.950,00	4.213.472.639,00	97,92
2	Belanja Barang dan Jasa	8.992.344.570,00	6.077.742.288,00	67,59
3	Hibah	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.295.364.520,00</b>	<b>10.291.214.927,00</b>	<b>77,40</b>

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

**5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai Dinas Perhubungan**

**Tabel 17 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.553.624.472,00	2.491.519.608,00	97,56
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.603.885.478,00	1.588.333.031,00	99,03
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Penghasilan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
7	Honorarium PNS dan Non PNS	0,00	0,00	0,00
8	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
9	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
10	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pegawai Operasional BLUD	0,00	0,00	0,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.510.000,00	133.620.000,00	91,82
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.303.019.950,00</b>	<b>4.213.472.639,00</b>	<b>97,92</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Dinas Perhubungan**

**Tabel 18 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	3.464.361.050,00	2.454.031.380,00	70,83
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	1.636.608.900,00	1.138.295.397,00	69,55
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	190.396.620,00	27.741.366,00	14,57
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000.000,00	1.559.410.000,00	76,44
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	777.858.000,00	703.631.145,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	876.770.000,00	190.133.000,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Honorarium PNS Dan Non PNS	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.350.000,00	4.500.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.992.344.570,00</b>	<b>6.077.742.288,00</b>	<b>67,59</b>

**5.1.2.1.2 Belanja Modal Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.231.344.175,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.140.849.381,00**

Belanja Modal Dinas Perhubungan TA 2023 adalah sebesar Rp.2.231.344.175,00 dengan tingkat realisasi 65,44% dari yang telah dianggarkan. Untuk rincian dari Belanja Modal Dinas Perhubungan TA 2023 dapat dilihat pada table berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**Tabel 19 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.999.131.375,00	1.875.508.975,00	62,54
3	Belanja Gedung dan Bangunan	360.160.000,00	355.835.200,00	98,80
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	50.680.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.409.971.375,00</b>	<b>2.231.344.175,00</b>	<b>65,44</b>

**5.1.2.1.2.1 Belanja Tanah**

**Tabel 20 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan	0	0	0
2	Kebun Campuran	0	0	0
3	Tanah untuk Bangunan Gedung	0	0	0
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Bukan Gedung	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.1.2.1.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

Berikut adalah rincian dari Belanja Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan TA 2023 dengan tingkat realisasi sebesar 62,54% dari anggaran:

**Tabel 21 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.651.306.000,00	1.470.300.000,00	89,04
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	14.400.000,00	7.400.000,00	51,39
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	9.922.000,00	9.720.000,00	97,96
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	99.786.000,00	62.908.975,00	63,04
12	Belanja Modal Komputer	73.400.000,00	73.050.000,00	99,52



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.412.000,00	1.280.000,00	90,65
17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas	1.148.905.375,00	250.850.000,00	21,83
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Pengadaan Amunisi	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.999.131.375,00</b>	<b>1.875.508.975,00</b>	<b>62,54</b>

**5.1.2.1.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan**

Berikut adalah rincian dari Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan TA 2023 dengan tingkat realisasi sebesar 98,80% dari anggaran:

**Tabel 22 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	360.160.000,00	355.835.200,00	98,80
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>360.160.000,00</b>	<b>355.835.200,00</b>	<b>98,80</b>





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.1.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**Tabel 23 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.1.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya**

**Tabel 24 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.680.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.1.2.6 Belanja Aset Lainnya**

**Tabel 25 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.2 Belanja UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.229.888.983,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.545.719.969,00**

**Tabel 26 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja UPT. Pengelolaan Perparkiran tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.500.260.500,00	2.041.756.058,00	73,66	1.377.689.969,00
2	Belanja Modal	192.000.000,00	188.132.925,00	75,59	168.030.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.692.260.500,00</b>	<b>2.229.888.983,00</b>	<b>73,86</b>	<b>1.545.719.969,00</b>

**5.1.2.2.1 Belanja Operasi UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.500.260.500,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.377.689.969,00**

Belanja Operasi UPT Perparkiran terdiri dari 2, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan tingkat realisasi sebesar 81,66% dari anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di table berikut:

**Tabel 27 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi (UPT. Perparkiran)**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.498.730.500,00	2.040.226.058,00	81,65
3	Hibah	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.500.260.500,00</b>	<b>2.041.756.058,00</b>	<b>81,66</b>

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**Tabel 28 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai UPT. Pengelolaan Perparkiran**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Penghasilan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
7	Honorarium PNS dan Non PNS	0,00	0,00	0,00
8	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
9	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
10	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pegawai Operasional BLUD	0,00	0,00	0,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>100,00</b>

**5.1.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**Tabel 29 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa UPT. Pengelolaan Perparkiran**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	291.690.500,00	287.383.800,00	98,52
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	1.456.990.000,00	1.193.017.750,00	81,88
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	125.000.000,00	86.274.508,00	69,01
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	148.500.000,00	49,50
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	325.050.000,00	325.050.000,00	100,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Honorarium PNS Dan Non PNS	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.498.730.500,00</b>	<b>2.040.226.058,00</b>	<b>81,65</b>

**5.1.2.2.2 Belanja Modal UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**188.132.925,00**

**168.030.000,00**

Belanja Modal UPT Perparkiran TA 2023 adalah sebesar Rp. 188.132.925,00 dengan tingkat realisasi 97,99% dari yang telah dianggarkan. Untuk rincian dari Belanja Modal UPT Perparkiran TA 2023 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 30 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal UPT. Pengelolaan Perparkiran**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	132.000.000,00	128.332.925,00	97,22
3	Belanja Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>192.000.000,00</b>	<b>188.132.925,00</b>	<b>97,99</b>

**5.1.2.2.2.1 Belanja Tanah**

**Tabel 31 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah UPT. Pengelolaan Perparkiran**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan	0	0	0
2	Kebun Campuran	0	0	0
3	Tanah untuk Bangunan Gedung	0	0	0
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Bukan Gedung	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

Berikut adalah rincian dari Belanja Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan TA 2023 dengan tingkat realisasi sebesar 97,22% dari anggaran:

**Tabel 32 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin UPT. Pengelolaan Perparkiran**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	63.000.000,00	62.850.000,00	99,76
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	14.570.000,00	97,13
13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	15.000.000,00	14.730.000,00	98,20
16	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000,00	16.484.925,00	91,58
17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas	21.000.000,00	19.698.000,00	93,80
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Pengadaan Amunisi	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

28	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>132.000.000,00</b>	<b>128.332.925,00</b>	<b>97,22</b>

#### 5.1.2.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Berikut adalah rincian dari Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan TA 2023 dengan tingkat realisasi sebesar 99,67% dari anggaran:

**Tabel 33 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>99,67</b>

#### 5.1.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Tabel 34 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel 35 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Tabel 36 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Dinas Perhubungan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.1.2.3 Belanja UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor

31 Desember 2023

(Rp)

483.175.162,00

31 Desember 2022

(Rp)

264.371.811,00

Tabel 37 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja UPT. PKB

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	449.474.000,00	307.645.162,00	68,45	264.371.811,00
2	Belanja Modal	176.070.000,00	175.530.000,00	99,69	0
3	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>625.544.000,00</b>	<b>483.175.162,00</b>	<b>77,24</b>	<b>264.371.811,00</b>

#### 5.1.2.3.1 Belanja Operasi UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor

31 Desember 2023

(Rp)

307.645.162,00

31 Desember 2022

(Rp)

264.371.811,00

Belanja Operasi UPT PKB terdiri dari 2, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan tingkat realisasi sebesar 68,45% dari anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di table berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**Tabel 38 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi UPT. PKB**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	449.474.000,00	307.645.162,00	68,45
3	Hibah	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>449.474.000,00</b>	<b>307.645.162,00</b>	<b>68,45</b>

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

**5.1.2.3.1.1 Belanja Barang & Jasa UPT. Pengujian Perbengkulan Kendaraan Bermotor**

**Tabel 39 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa UPT. PKB**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	160.974.000,00	137.965.000,00	85,70
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	77.000.000,00	41.625.000,00	54,05
5	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.200.000,00	17.055.162,00	34,66
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	34.000.000,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.300.000,00	69.000.000,00	89,26
20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Honorarium PNS Dan Non PNS	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

26	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	51.000.000,00	42.000.000,00	82,35
<b>TOTAL</b>		<b>449.474.000,00</b>	<b>307.645.162,00</b>	<b>68,45</b>

**5.1.2.3.2 Belanja Modal UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**175.530.000,00**

**188.132.925,00**

Belanja Modal UPT Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor TA 2023 adalah sebesar Rp. 175.530.000,00 dengan tingkat realisasi 99,69% dari yang telah dianggarkan. Untuk rincian dari Belanja Modal UPT Perpustakaan TA 2023 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 40 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	176.070.000,00	175.530.000,00	99,69
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>176.070.000,00</b>	<b>175.530.000,00</b>	<b>99,69</b>

**5.1.2.3.2.1 Belanja Tanah**

**Tabel 41 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah UPT. Pengelolaan Perpustakaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan	0	0	0
2	Kebun Campuran	0	0	0
3	Tanah untuk Bangunan Gedung	0	0	0
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Bukan Gedung	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.1.2.3.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

Berikut adalah rincian dari Belanja Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan TA 2023 dengan tingkat realisasi sebesar 97,22% dari anggaran:

**Tabel 42 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin UPT. Pengelolaan Perpustakaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	176.070.000,00	175.530.000,00	99,69
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Pengadaan Amunisi	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>176.070.000,00</b>	<b>175.530.000,00</b>	<b>99,69</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.1.2.3.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan**

**Tabel 43 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.3.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**Tabel 44 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.3.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya**

**Tabel 45 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 5.1.2.3.2.6 Belanja Aset Lainnya

Tabel 46 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya Dinas Perhubungan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.1.3 Surplus/Defisit LRA

#### 5.1.3.1 Surplus/Defisit LRA Dinas Perhubungan

31 Desember 2023

(Rp)

**(9.784.441.370,00)**

31 Desember 2022

(Rp)

**(10.002.661.093,00)**

Tabel 47 Tabel Surplus/Defisit LRA Dinas Perhubungan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.584.835.895,00)	(9.784.441.370,00)	72,02
<b>TOTAL</b>		<b>(13.584.835.895,00)</b>	<b>(9.784.441.370,00)</b>	<b>72,02</b>

Tabel 48 Tabel Rincian Surplus/Defisit LRA Dinas Perhubungan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	3.120.500.000,00	2.738.117.732,00	87,75	1.778.877.419,00
2	Belanja	16.705.335.895,00	12.522.559.102,00	74,96	11.781.538.512,00
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>(13.584.835.895,00)</b>	<b>(9.784.441.370,00)</b>	<b>72,02</b>	<b>(10.002.661.093,00)</b>

#### 5.1.3.2 Surplus/Defisit LRA UPT. Pengelolaan Perpajakan

31 Desember 2023

(Rp)

**(2.229.888.983,00)**

31 Desember 2022

(Rp)

**(196.634.700,00)**

Tabel 49 Tabel Surplus/Defisit LRA UPT. Pengelolaan Perpajakan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.692.260.500,00)	(2.229.888.983,00)	82,83
<b>TOTAL</b>		<b>(2.692.260.500,00)</b>	<b>(2.229.888.983,00)</b>	<b>82,83</b>

Tabel 50 Tabel Rincian Surplus/Defisit LRA UPT. Pengelolaan Perpajakan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	0	0	0	0
2	Belanja	2.692.260.500,00	2.229.888.983,00	82,83	196.634.700,00
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>(2.692.260.500,00)</b>	<b>(2.229.888.983,00)</b>	<b>82,83</b>	<b>(196.634.700,00)</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.1.3.3 Surplus/Defisit LRA UPT. Pengujian Perbengkakan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(483.175.162,00)**

**(264.371.811,00)**

**Tabel 51 Tabel Surplus/Defisit LRA UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	SURPLUS / (DEFISIT)	(625.544.000,00)	(483.175.162,00)	77,24
<b>TOTAL</b>		<b>(625.544.000,00)</b>	<b>(483.175.162,00)</b>	<b>77,24</b>

**Tabel 52 Tabel Rincian Surplus/Defisit LRA UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	0	0	0	0
2	Belanja	625.544.000,00	483.175.162,00	82,83	(56.000.000,00)
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>(625.544.000,00)</b>	<b>(483.175.162,00)</b>	<b>82,83</b>	<b>(56.000.000,00)</b>

**5.1.4 Pembiayaan Netto**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**0**

**0**

**5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**

**5.1.5.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(9.784.441.370,00)**

**(10.002.661.093,00)**

**Tabel 53 Tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	3.120.500.000,00	2.738.117.732,00	87,75	1.778.877.419,00
2	Belanja	16.705.335.895,00	12.522.559.102,00	74,96	11.781.538.512,00
3	Surplus (Defisit)	(13.584.835.895,00)	(9.784.441.370,00)	72,02	(10.002.661.093,00)
4	Pembiayaan Netto	0	0	0	0
<b>SILPA</b>		<b>(13.584.835.895,00)</b>	<b>(9.784.441.370,00)</b>	<b>72,02</b>	<b>(10.002.661.093,00)</b>

**5.1.5.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(2.229.888.983,00)**

**(196.634.700,00)**



No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	0	0	0	0
2	Belanja	2.692.260.500,00	2.229.888.983,00	82,83	196.634.700,00
3	Surplus (Defisit)	(2.692.260.500,00)	(2.229.888.983,00)	82,83	(196.634.700,00)
4	Pembiayaan Netto	0	0	0	0
<b>SILPA</b>		<b>(2.692.260.500,00)</b>	<b>(2.229.888.983,00)</b>	<b>82,83</b>	<b>(196.634.700,00)</b>

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	0	0	0	0
2	Belanja	625.544.000,00	483.175.162,00	82,83	56.000.000,00
3	Surplus (Defisit)	(625.544.000,00)	(483.175.162,00)	82,83	(56.000.000,00)
4	Pembiayaan Netto	0	0	0	0
<b>SILPA</b>		<b>(625.544.000,00)</b>	<b>(483.175.162,00)</b>	82,83	<b>(56.000.000,00)</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0	0

**5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0	0

**5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dinas Perhubungan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(9.784.441.370,00)	(10.002.661.093,00)

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) UPT. Perparkiran**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(2.229.888.983,00)	(196.634.700,00)

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) UPT. PKB**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(483.175.162,00)	(56.000.000,00)

**5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0	0



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.3 NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Aset Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 Rp. 14.565.932.495,24 dan 2022 sebesar Rp. 10.675.285.007,95. Saldo Aset per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp. 3.890.647.487,29 atau sebesar 36,45% dari Saldo Aset per 31 Desember 2022.

Aset UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 1.289.251.688,25 dan 2022 sebesar Rp. 1.646.429.846,33 turun sebesar Rp. 357.178.158,08 atau sebesar 21,69%.

Aset UPT. Pengelolaan Perparkiran per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. (1.347.913.230,99) dan 2022 sebesar Rp. 227.267.457,29 turun sebesar Rp. 1.575.180.688,28 atau sebesar 693,10% dengan catatan nilai minus pada aset UPT. Perparkiran dikarenakan timbul nilai minus pada piutang lainnya di aset lancar karena spj ada di upt, sedangkan sppm ada di Dinas. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

**5.3.1 Aset Lancar**

**5.3.1.1 Aset Lancar Dinas Perhubungan**

<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2.059.758.507,00</b>	<b>66.746.550,00</b>

**Tabel 56 Tabel Aset Lancar Dinas Perhubungan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
1	Piutang Retribusi	906.982.088,00	933.981.138,00
2	Penyisihan Piutang	(904.494.838,00)	(870.325.238,00)
3	Piutang Lainnya	1.867.217.712,00	0,00
4	Persediaan	190.053.545,00	3.090.650,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.059.758.507,00</b>	<b>66.746.550,00</b>

**5.3.1.1.1 Piutang Retribusi**

<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>906.982.088,00</b>	<b>933.981.138,00</b>

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 906.982.088,00 sedangkan saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 933.981.138,00. Piutang tersebut terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 903.244.088,00 dan Piutang Retribusi Pelayanan Tempatkan Khusus Parkir sebesar Rp. 3.738.000,00.





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Terdapat penurunan piutang retribusi sebesar Rp. 26.999.050,00 atau sebesar 2,89% dari piutang retribusi tahun sebelumnya dikarenakan adanya Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar **Rp. 600.000** dan Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir **Rp. 28.999.050,00** dan Penambahan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Tepi Jalan Umum sebesar **Rp. 61.225.000**. Berikut rincian perubahan piutang retribusi Parkir Tepi Jalan Umum:

**Tabel 57 Mutasi Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%+ / (-)
1	Saldo Awal Piutang	901.244.088,00	840.819.088,00	60.425.000,00	7,18
2	Koreksi Tambah Nilai Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Kurang Nilai Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Piutang	(600.000,00)	(800.000,00)	200.000,00	(25,00)
5	Penambahan Piutang	2.600.000,00	61.225.000,00	(58.625.000,00)	(95,75)
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>903.244.088,00</b>	<b>901.244.088,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,22</b>

Berikut rincian perubahan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir:

**Tabel 58 Mutasi Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%+ / (-)
1	Saldo Awal Piutang	32.737.050,00	71.879.200,00	(39.142.150,00)	(54,46)
2	Koreksi Tambah Nilai Piutang	0,00	28.999.050,00	(28.999.050,00)	(100,00)
3	Koreksi Kurang Nilai Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Piutang	(28.999.050,00)	(68.141.200,00)	39.142.150,00	57,44
5	Penambahan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>3.738.000,00</b>	<b>32.737.050,00</b>	<b>(28.999.050,00)</b>	<b>(88,58)</b>

#### 5.3.1.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**(904.494.838,00)**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(870.325.238,00)**

Saldo penyisihan piutang retribusi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (904.494.838,00) sedangkan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (870.325.238,00) sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. (34.169.600,00) atau sebesar 3,93%.

Rincian penyisihan piutang retribusi adalah sebagai berikut :

**Tabel 59 Tabel Penyisihan Piutang**

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%+ / (-)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(900.756.838,00)	(848.162.905,50)	(52.593.932,50)	6,20
2	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	(3.738.000,00)	(22.162.332,50)	18.424.332,50	(83,13)
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>(904.494.838,00)</b>	<b>(870.325.238,00)</b>	<b>(34.169.600,00)</b>	<b>3,93</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.1.1.3 Piutang Lainnya**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.867.217.712,00**

**0**

**5.3.1.1.4 Persediaan Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**190.053.545,00**

**3.090.650,00**

**Tabel 60 Tabel Persediaan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	110.725,00	449.000,00
2	Persediaan Bahan Cetak	0,00	2.641.650,00
3	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.942.820,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>190.053.545,00</b>	<b>3.090.650,00</b>

**5.3.1.2 Aset Lancar UPT. Perpajakan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(1.651.333.000,00)**

**6.390.000,00**

**Tabel 61 Tabel Aset Lancar UPT. Perpajakan**

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Piutang Lainnya	(1.659.517.550,00)	0,00
2	Persediaan	8.184.550,00	6.390.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>(1.651.333.000,00)</b>	<b>6.390.000,00</b>

**5.3.1.2.1 Piutang Lainnya**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(1.659.517.550,00)**

**0**

**5.3.1.2.2 Persediaan UPT. Perpajakan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**8.184.550,00**

**6.390.000,00**

**Tabel 62 Tabel Persediaan UPT. Perpajakan**

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Cetak Retribusi Karcis Parkir	0,00	6.390.000,00
2	Persediaan Alat Tulis Kantor	8.184.550,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.184.550,00</b>	<b>6.390.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.1.3 Aset Lancar UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(161.100.162,00)**

**12.500.000,00**

**Tabel 63 Tabel Aset Lancar UPT. PKB**

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Piutang Lainnya	(207.700.162,00)	0,00
2	Persediaan	46.600.000,00	12.500.000,00
TOTAL		(161.100.162,00)	12.500.000,00

**5.3.1.3.1 Piutang Lainnya**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(207.700.162,00)**

**0**

**5.3.1.3.2 Persediaan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**12.500.000,00**

**12.500.000,00**

**Tabel 64 Tabel Persediaan UPT. PKB**

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	46.600.000,00	0,00
2	Persediaan Bahan Cetak	0,00	12.500.000,00
TOTAL		46.600.000,00	12.500.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.2 Aset Tetap**

**5.3.2.1 Aset Tetap Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**12.506.173.988,24**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**10.608.538.457,95**

Aset Tetap Dinas Perhubungan pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 12.506.173.988,24 terjadi kenaikan sebesar 17,89% atau sebesar Rp. 1.897.635.530,29 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 65 Tabel Aset Tetap Dinas Perhubungan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	3.212.692.000,00	3.212.692.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	17.002.117.777,55	12.719.693.102,55	4.282.424.675,00	33,67
Gedung dan Bangunan	5.683.962.532,47	5.496.457.332,47	187.505.200,00	3,41
Aset Tetap Lainnya	894.675.890,00	841.325.890,00	53.350.000,00	6,34
Akumulasi Penyusutan	(14.287.274.211,78)	(11.661.629.867,07)	(2.625.644.344,71)	22,52
<b>Aset Tetap</b>	<b>12.506.173.988,24</b>	<b>10.608.538.457,95</b>	<b>1.897.635.530,29</b>	<b>17,89</b>

**5.3.2.1.1 Tanah Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**3.212.692.000,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**3.212.692.000,00**

**Tabel 66 Tabel Rincian Tanah Dinas Perhubungan**

No.	URAIAN	TANAH
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.921.625.000,00
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	291.067.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.312.692.000,00</b>

Pada Tahun 2023 tidak ada pengurangan ataupun penambahan pada Aset Tetap Tanah Dinas Perhubungan.

**5.3.2.1.2 Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**17.002.117.777,55**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**12.719.693.102,55**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 17.002.117.777,55 dan Rp. 12.719.693.102,55. Terjadi Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.282.424.675,00 Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 67 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan**

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	<b>ASET 2023</b>	<b>12.719.693.102,55</b>
	Koreksi Catat 2023	-
<b>A.</b>	<b>PENAMBAHAN :</b>	<b>4.459.674.675,00</b>
1	Belanja Modal	1.875.508.975,00
2	Mutasi Antar SKPD	429.760.000,00
3	Hibah	2.154.405.700,00
<b>B.</b>	<b>PENGURANGAN :</b>	<b>177.250.000,00</b>
1	Ekstra 2023	26.200.000,00
2	Mutasi Antar SKPD	97.150.000,00
3	Reklas Belanja Persediaan	550.000,00
4	Reklasifikasi	53.350.000,00
	<b>ASET PER 31 DESEMBER 2023</b>	<b>17.002.117.777,55</b>

**A. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp 4.459.674.675,00**

Penambahan Aset pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tahun 2023 Rp 1.875.508.975,00

**Tabel 68 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.05.01.05.077	0001	Papan Pengumuman	810.000,00
2	1.3.2.05.01.05.077	0002	Papan Pengumuman	810.000,00
3	1.3.2.05.01.05.077	0003	Papan Pengumuman	810.000,00
4	1.3.2.05.01.05.077	0004	Papan Pengumuman	810.000,00
5	1.3.2.05.01.05.077	0005	Papan Pengumuman	810.000,00
6	1.3.2.05.01.05.077	0006	Papan Pengumuman	810.000,00
7	1.3.2.05.01.05.077	0007	Papan Pengumuman	810.000,00
8	1.3.2.05.01.05.077	0008	Papan Pengumuman	810.000,00
9	1.3.2.05.01.05.077	0009	Papan Pengumuman	810.000,00
10	1.3.2.05.01.05.077	0010	Papan Pengumuman	810.000,00
11	1.3.2.05.01.05.077	0011	Papan Pengumuman	810.000,00
12	1.3.2.05.01.05.077	0012	Papan Pengumuman	810.000,00
13	1.3.2.05.03.03.008	0001	Kursi Kerja Pegawai Non	850.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

			Struktural	
14	1.3.2.05.03.03.008	0002	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
15	1.3.2.05.03.03.008	0003	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
16	1.3.2.05.03.03.008	0004	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
17	1.3.2.05.03.03.008	0005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
18	1.3.2.05.03.03.008	0006	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
19	1.3.2.05.03.03.008	0007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
20	1.3.2.05.03.03.008	0008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
21	1.3.2.05.03.03.008	0009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
22	1.3.2.05.03.03.008	0010	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
23	1.3.2.05.03.03.008	0011	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
24	1.3.2.05.03.03.008	0012	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
25	1.3.2.05.03.03.008	0013	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
26	1.3.2.05.03.03.008	0014	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
27	1.3.2.05.03.03.008	0015	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
28	1.3.2.05.03.03.008	0016	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
29	1.3.2.05.03.03.008	0017	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
30	1.3.2.05.02.04.004	0003	A.C. Split	6.750.000,00
31	1.3.2.05.02.04.004	0004	A.C. Split	6.750.000,00
32	1.3.2.05.02.04.004	0005	A.C. Split	6.750.000,00
33	1.3.2.05.02.04.004	0006	A.C. Split	4.880.000,00
34	1.3.2.05.02.04.004	0007	A.C. Split	4.880.000,00
35	1.3.2.05.02.04.004	0008	A.C. Split	6.750.000,00
36	1.3.2.05.01.05.086	0001	Sirine	18.000.000,00
37	1.3.2.05.01.05.086	0001	Sirine	18.000.000,00
38	1.3.2.03.03.09.004	0001	Alat Pengukur Garis Tengah	650.000,00
39	1.3.2.03.03.09.004	0002	Alat Pengukur Garis Tengah	650.000,00
40	1.3.2.09.04.03.004	0002	GPS	6.100.000,00
41	1.3.2.18.01.02.010	00001	Guardrail	2.500.000,00
42	1.3.2.18.01.02.010	00001	Guardrail	2.500.000,00
43	1.3.2.18.01.02.010	00002	Guardrail	2.500.000,00
44	1.3.2.18.01.02.010	00003	Guardrail	2.500.000,00
45	1.3.2.18.01.02.010	00004	Guardrail	2.500.000,00
46	1.3.2.18.01.02.010	00005	Guardrail	2.500.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

47	1.3.2.18.01.02.010	00006	Guardrail	2.500.000,00
48	1.3.2.18.01.02.010	00007	Guardrail	2.500.000,00
49	1.3.2.18.01.02.010	00008	Guardrail	2.500.000,00
50	1.3.2.18.01.02.010	00009	Guardrail	2.500.000,00
51	1.3.2.18.01.02.010	00010	Guardrail	2.500.000,00
52	1.3.2.18.01.02.010	00011	Guardrail	2.500.000,00
53	1.3.2.18.01.02.010	00012	Guardrail	2.500.000,00
54	1.3.2.18.01.02.010	00013	Guardrail	2.500.000,00
55	1.3.2.18.01.02.010	00014	Guardrail	2.500.000,00
56	1.3.2.18.01.02.010	00015	Guardrail	2.500.000,00
57	1.3.2.18.01.02.010	00016	Guardrail	2.500.000,00
58	1.3.2.18.01.02.010	00017	Guardrail	2.500.000,00
59	1.3.2.18.01.02.010	00018	Guardrail	2.500.000,00
60	1.3.2.18.01.02.010	00019	Guardrail	2.500.000,00
61	1.3.2.18.01.02.010	00020	Guardrail	2.500.000,00
62	1.3.2.18.01.02.010	00021	Guardrail	2.500.000,00
63	1.3.2.18.01.02.010	00022	Guardrail	2.500.000,00
64	1.3.2.18.01.02.010	00023	Guardrail	2.500.000,00
65	1.3.2.18.01.02.010	00024	Guardrail	2.500.000,00
66	1.3.2.18.01.02.010	00025	Guardrail	2.500.000,00
67	1.3.2.18.01.02.010	00026	Guardrail	2.500.000,00
68	1.3.2.18.01.02.010	00027	Guardrail	2.500.000,00
69	1.3.2.18.01.02.010	00028	Guardrail	2.500.000,00
70	1.3.2.18.01.02.010	00029	Guardrail	2.500.000,00
71	1.3.2.18.01.02.010	00030	Guardrail	2.500.000,00
72	1.3.2.18.01.02.010	00031	Guardrail	2.500.000,00
73	1.3.2.18.01.02.010	00032	Guardrail	2.500.000,00
74	1.3.2.18.01.02.010	00033	Guardrail	2.500.000,00
75	1.3.2.18.01.02.010	00034	Guardrail	2.500.000,00
76	1.3.2.18.01.02.010	00035	Guardrail	2.500.000,00
77	1.3.2.18.01.02.010	00036	Guardrail	2.500.000,00
78	1.3.2.18.01.02.010	00037	Guardrail	2.500.000,00
79	1.3.2.18.01.02.010	00038	Guardrail	2.500.000,00
80	1.3.2.18.01.02.010	00039	Guardrail	2.500.000,00
81	1.3.2.18.01.02.010	00040	Guardrail	2.500.000,00
82	1.3.2.18.01.02.010	00041	Guardrail	2.500.000,00
83	1.3.2.18.01.02.010	00042	Guardrail	2.500.000,00
84	1.3.2.18.01.02.010	00043	Guardrail	2.500.000,00
85	1.3.2.18.01.02.010	00044	Guardrail	2.500.000,00
86	1.3.2.18.01.02.010	00045	Guardrail	2.500.000,00
87	1.3.2.18.01.02.010	00046	Guardrail	2.500.000,00
88	1.3.2.18.01.02.010	00047	Guardrail	2.500.000,00
89	1.3.2.18.01.02.010	00048	Guardrail	2.500.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

90	1.3.2.18.01.02.010	00049	Guardrail	2.500.000,00
91	1.3.2.18.01.02.010	00050	Guardrail	2.500.000,00
92	1.3.2.18.01.02.010	00051	Guardrail	2.500.000,00
93	1.3.2.18.01.02.010	00052	Guardrail	2.500.000,00
94	1.3.2.18.01.02.010	00053	Guardrail	2.500.000,00
95	1.3.2.18.01.02.010	00054	Guardrail	2.500.000,00
96	1.3.2.18.01.02.010	00055	Guardrail	2.500.000,00
97	1.3.2.18.01.02.010	00056	Guardrail	2.500.000,00
98	1.3.2.18.01.02.010	00057	Guardrail	2.500.000,00
99	1.3.2.18.01.02.010	00058	Guardrail	2.500.000,00
100	1.3.2.18.01.02.010	00059	Guardrail	2.500.000,00
101	1.3.2.18.01.02.010	00060	Guardrail	2.500.000,00
102	1.3.2.18.01.02.010	00061	Guardrail	2.500.000,00
103	1.3.2.18.01.02.010	00062	Guardrail	2.500.000,00
104	1.3.2.18.01.02.010	00063	Guardrail	2.500.000,00
105	1.3.2.18.01.02.010	00064	Guardrail	2.500.000,00
106	1.3.2.18.01.02.010	00065	Guardrail	2.500.000,00
107	1.3.2.18.01.02.010	00066	Guardrail	2.500.000,00
108	1.3.2.18.01.02.010	00067	Guardrail	2.500.000,00
109	1.3.2.18.01.02.010	00068	Guardrail	2.500.000,00
110	1.3.2.18.01.02.010	00069	Guardrail	2.500.000,00
111	1.3.2.18.01.02.010	00070	Guardrail	2.500.000,00
112	1.3.2.18.01.02.010	00071	Guardrail	2.500.000,00
113	1.3.2.18.01.02.010	00072	Guardrail	2.500.000,00
114	1.3.2.18.01.02.010	00073	Guardrail	2.500.000,00
115	1.3.2.18.01.02.010	00074	Guardrail	2.500.000,00
116	1.3.2.18.01.02.010	00075	Guardrail	2.500.000,00
117	1.3.2.18.01.02.010	00076	Guardrail	2.500.000,00
118	1.3.2.18.01.02.010	00077	Guardrail	2.500.000,00
119	1.3.2.18.01.02.010	00078	Guardrail	2.500.000,00
120	1.3.2.10.02.03.009	00001	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	365.000,00
121	1.3.2.10.02.03.009	00002	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	365.000,00
122	1.3.2.10.02.03.003	00012	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.695.000,00
123	1.3.2.10.02.03.003	00013	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.695.000,00
124	1.3.2.10.02.03.003	00014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6.710.000,00
125	1.3.2.10.01.02.001	00006	P.C Unit	12.000.000,00
126	1.3.2.10.01.02.001	00007	P.C Unit	12.000.000,00
127	1.3.2.10.01.02.001	00008	P.C Unit	12.000.000,00
128	1.3.2.10.01.02.001	00009	P.C Unit	12.000.000,00
129	1.3.2.10.01.02.001	00010	P.C Unit	14.950.000,00





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

130	1.3.2.02.01.02.005	0001	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	468.700.000,00
131	1.3.2.02.01.02.005	0001	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	467.700.000,00
132	1.3.2.02.01.02.005	0002	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	433.000.000,00
133	1.3.2.02.01.04.006	0001	Kendaraan Bermotor Roda Dua Lainnya	64.900.000,00
134	1.3.2.05.02.06.008	0001	Sound System	6.798.975,00
135	1.3.2.05.02.06.068	0001	Tangga	4.900.000,00
136	1.1.7.01.03.06.010.001		Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	550.000,00
137			Perencanaan	53.350.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.875.508.975,00</b>

2. Hibah Tahun 2023 Rp. 2.154.405.700,00

**Tabel 69 Rincian Peambahan Aset Karena Hibah**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.02.01.02.001	0003	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	663.000.000,00
2	1.3.2.02.01.02.003	0017	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	515.560.000,00
3	1.3.2.02.01.02.003	0018	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	487.922.850,00
4	1.3.2.02.01.02.003	0019	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	487.922.850,00
<b>Jumlah</b>				<b>2.154.405.700,00</b>

3. Mutasi Antar SKPD 2023 Rp. 429.760.000,00

**Tabel 70 Rincian Penambahan Aset Karena Mutasi Antar SKPD**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.02.01.04.001	00002	Sepeda Motor	23.912.000,00
2	1.3.2.02.01.04.001	00003	Sepeda Motor	23.912.000,00
3	1.3.2.02.01.04.001	00005	Sepeda Motor	23.912.000,00
4	1.3.2.02.01.04.001	00001	Sepeda Motor	23.912.000,00
5	1.3.2.02.01.04.001	00004	Sepeda Motor	23.912.000,00
6	1.3.2.02.01.01.003	0002	Station Wagon	155.800.000,00
7	1.3.2.02.01.02.003	0004	Mini Bus (Penumpang < 14 Orang)	35.700.000,00
8	1.3.2.02.01.02.003	0002	Mini Bus (Penumpang < 14 Orang)	20.000.000,00
9	1.3.2.02.01.02.003	0002	Mini Bus (Penumpang < 14 Orang)	28.000.000,00
10	1.3.2.02.01.02.003	00001	Mini Bus (Penumpang < 14 Orang)	24.000.000,00
11	1.3.2.02.01.02.003	00002	Mini Bus (Penumpang < 14 Orang)	46.700.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>429.760.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**B. Pengurangan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023**  
**sebesar Rp. 177.250.000,00**

Pengurangan Aset pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sebagai berikut :

**1. REKLAS BELANJA PERSEDIAAN Rp 550.000,00**

**Tabel 71 Rincian Pengurangan Aset Karena Reklas Belanja Persediaan**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.1.7.01.03.06.010.001		Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	550.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>550.000,00</b>

**2. BARANG BUKAN ASET/EKSTRACOMPTABEL Rp. 26.200.000,00**

**Tabel 72 Rincian Pengurangan Aset Karena Ekstracomptabel**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.05.01.05.077	0001	Papan Pengumuman	810.000,00
2	1.3.2.05.01.05.077	0002	Papan Pengumuman	810.000,00
3	1.3.2.05.01.05.077	0003	Papan Pengumuman	810.000,00
4	1.3.2.05.01.05.077	0004	Papan Pengumuman	810.000,00
5	1.3.2.05.01.05.077	0005	Papan Pengumuman	810.000,00
6	1.3.2.05.01.05.077	0006	Papan Pengumuman	810.000,00
7	1.3.2.05.01.05.077	0007	Papan Pengumuman	810.000,00
8	1.3.2.05.01.05.077	0008	Papan Pengumuman	810.000,00
9	1.3.2.05.01.05.077	0009	Papan Pengumuman	810.000,00
10	1.3.2.05.01.05.077	0010	Papan Pengumuman	810.000,00
11	1.3.2.05.01.05.077	0011	Papan Pengumuman	810.000,00
12	1.3.2.05.01.05.077	0012	Papan Pengumuman	810.000,00
13	1.3.2.05.03.03.008	0001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
14	1.3.2.05.03.03.008	0002	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
15	1.3.2.05.03.03.008	0003	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
16	1.3.2.05.03.03.008	0004	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
17	1.3.2.05.03.03.008	0005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
18	1.3.2.05.03.03.008	0006	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
19	1.3.2.05.03.03.008	0007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
20	1.3.2.05.03.03.008	0008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
21	1.3.2.05.03.03.008	0009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

22	1.3.2.05.03.03.008	0010	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
23	1.3.2.05.03.03.008	0011	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
24	1.3.2.05.03.03.008	0012	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
25	1.3.2.05.03.03.008	0013	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
26	1.3.2.05.03.03.008	0014	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
27	1.3.2.05.03.03.008	0015	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
28	1.3.2.05.03.03.008	0016	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
29	1.3.2.05.03.03.008	0017	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	850.000,00
30	1.3.2.03.03.09.004	0001	Alat Pengukur Garis Tengah	650.000,00
31	1.3.2.03.03.09.004	0002	Alat Pengukur Garis Tengah	650.000,00
32	1.3.2.10.02.03.009	00001	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	365.000,00
33	1.3.2.10.02.03.009	00002	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	365.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>26.200.000,00</b>

3. Mutasi Antar SKPD Rp. 97.150.000,00

**Tabel 73 Rincian Pengurangan Aset Karena Mutasi Antar SKPD**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.03.01.03.033	0001	Peralatan Listrik	15.250.000,00
2	1.3.2.02.01.04.001	0005	Sepeda Motor	6.000.000,00
3	1.3.2.02.01.02.003	0014	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	48.900.000,00
4	1.3.2.02.01.04.001	0011	Sepeda Motor	9.000.000,00
5	1.3.2.02.01.04.001	0008	Sepeda Motor	9.000.000,00
6	1.3.2.02.01.04.001	00004	Sepeda Motor	9.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>97.150.000,00</b>

4. Reklasifikasi Rp. 53.350.000,00

**Tabel 74 Rincian Pengurangan Aset Karena Reklasifikasi**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.1.7.01.03.06.010.001		Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	53.350.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>53.350.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.2.1.3 Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**5.683.962.532,47**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**5.496.457.332,47**

**Tabel 75 Tabel Rincian Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan**

No.	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2022	5.496.457.332,47
2	Koreksi Kurang	0
3	Koreksi Tambah	0
4	Saldo Awal 2023	5.496.457.332,47
5	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2023	355.835.200,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>355.835.200,00</b>
6	Pengurangan :	
	a. Mutasi Antar SKPD	69.410.000,00
	b. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	98.920.000,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>168.330.000,00</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.683.962.532,47</b>

**A. Penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 355.835.200,00 terdiri dari:**

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Rp. 355.835.200,00

**Tabel 76 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.3.01.01.33.002	0001	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	68.260.000,00
2			Ruang Arsip	69.410.000,00
3			Pengecatan	98.920.000,00
4	1.3.3.01.01.01.001	00001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50.535.200,00
5	1.3.3.01.01.18.002	00001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	68.710.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>355.835.200,00</b>



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

B. Pengurangan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 168.330.000,00 terdiri dari:

1. REKLASIFIKASI KE BARANG DAN JASA Rp. 98.920.000,00

**Tabel 77 Rincian Pengurangan Aset Karena Reklasifikasi ke Barang dan Jasa**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1			Pengecatan	98.920.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>98.920.000,00</b>

2. MUTASI ANTAR SKPD Rp. 69.410.000,00

**Tabel 78 Rincian Pengurangan Aset Karena Mutasi Antar SKPD**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1			Ruang Arsip	69.410.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>69.410.000,00</b>

### 5.3.2.1.4 Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**894.675.890,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**841.325.890,00**

**Tabel 79 Rincian Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan**

	Saldo Akhir 2022	841.325.890,00
	Koreksi Tambah	
	Saldo Awal 2023	841.325.890,00
a	Reklasifikasi	53.350.000,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>53.350.000,00</b>
a.	Ekstra	0
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>894.675.890,00</b>

A. Penambahan tersebut dikarenakan ada Reklasifikasi pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Rp. 53.350.000

**Tabel 80 Rincian Penambahan Aset Karena Reklasifikasi**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.5.01.01.08.001	0001	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	8.250.000,00
2	1.3.5.01.01.08.001	0001	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	20.100.000,00
3	1.3.5.01.01.08.001	0001	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>53.350.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.3.2.1.5 Akumulasi Penyusutan Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**(14.287.274.211,78)**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(11.661.629.867,07)**

**Tabel 81 Rincian Akumulasi Penyusutan Dinas Perhubungan**

No	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Audited Peralatan dan Mesin Tahun 2022	(10.494.689.440,60)
2	Akumulasi Penyusutan Audited Gedung dan Bangunan Tahun 2022	(1.166.940.426,47)
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022</b>	<b>(11.661.629.867,07)</b>
3	Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023	(2.161.260.899,38)
4	Adjm. Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
5	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(213.050.000,00)
5	Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023	(251.333.445,33)
6	Adjm. Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
	<b>Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>(2.625.644.344,71)</b>
7	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023</b>	<b>(14.287.274.211,78)</b>

**5.3.2.2 Aset Tetap UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**274.019.769,01**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**181.677.457,29**

Aset Tetap UPT. Pengelolaan Perparkiran pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 274.019.769,01 terjadi kenaikan sebesar 50,83% atau sebesar Rp. 92.342.311,72 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 82 Rincian Aset Tetap UPT. Perparkiran**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	408.160.210,71	294.557.285,71	113.602.925,00	38,57
Gedung dan Bangunan	59.800.000,00	0,00	59.800.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(193.940.441,70)	(112.879.828,42)	(81.060.613,28)	71,81
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>274.019.769,01</b>	<b>181.677.457,29</b>	<b>92.342.311,72</b>	<b>50,83</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.2.2.1 Peralatan dan Mesin UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**408.160.210,71**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**294.557.285,71**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 294.557.285,71 dan Rp 175.527.285,71 Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 83 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin UPT. Perparkiran**

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	<b>ASET 31 Desember 2022</b>	<b>294.557.285,71</b>
	Koreksi Catat 2023	-
<b>A.</b>	<b>PENAMBAHAN :</b>	<b>128.332.925,00</b>
1	Belanja Modal	128.332.925,00
<b>B.</b>	<b>PENGURANGAN :</b>	<b>14.730.000,00</b>
1	Ekstra 2023	14.730.000,00
	<b>ASET PER 31 DESEMBER 2023</b>	<b>408.160.210,71</b>

**A. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp 128.332.925,00**

Penambahan Aset pada UPT Perparkiran pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Rp 128.332.925,00

**Tabel 84 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.06.02.01.006	00001	Handy Talky (HT)	973.000,00
2	1.3.2.06.02.01.006	00002	Handy Talky (HT)	973.000,00
3	1.3.2.06.02.01.006	00003	Handy Talky (HT)	973.000,00
4	1.3.2.06.02.01.006	00004	Handy Talky (HT)	973.000,00
5	1.3.2.06.02.01.006	00005	Handy Talky (HT)	973.000,00
6	1.3.2.06.02.01.006	00006	Handy Talky (HT)	973.000,00
7	1.3.2.06.02.01.006	00007	Handy Talky (HT)	973.000,00
8	1.3.2.06.02.01.006	00008	Handy Talky (HT)	973.000,00
9	1.3.2.06.02.01.006	00009	Handy Talky (HT)	973.000,00
10	1.3.2.06.02.01.006	00010	Handy Talky (HT)	973.000,00
11	1.3.2.10.02.03.004	00001	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3.797.975,00
12	1.3.2.10.02.03.003	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.362.975,00
13	1.3.2.10.02.03.003	00002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.597.975,00
14	1.3.2.10.01.02.002	0003	Lap Top	14.570.000,00
15	1.3.2.18.01.02.002	0006	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

16	1.3.2.18.01.02.002	0007	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
17	1.3.2.18.01.02.002	0008	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
18	1.3.2.18.01.02.002	0009	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
19	1.3.2.18.01.02.002	0010	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
20	1.3.2.18.01.02.002	0011	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
21	1.3.2.18.01.02.002	0012	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
22	1.3.2.18.01.02.002	0013	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
23	1.3.2.18.01.02.002	0014	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
24	1.3.2.18.01.02.002	0015	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
25	1.3.2.18.01.02.002	0016	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
26	1.3.2.18.01.02.002	0017	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
27	1.3.2.18.01.02.002	0018	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
28	1.3.2.18.01.02.002	0019	Rambu Papan Tambahan	1.407.000,00
29	1.3.2.06.02.01.006	0011	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
30	1.3.2.06.02.01.006	0012	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
31	1.3.2.06.02.01.006	0013	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
32	1.3.2.06.02.01.006	0014	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
33	1.3.2.06.02.01.006	0015	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
34	1.3.2.05.01.05.077	0001	Papan Pengumuman	2.990.000,00
35	1.3.2.05.01.05.077	0002	Papan Pengumuman	2.990.000,00
36	1.3.2.05.01.05.077	0003	Papan Pengumuman	2.990.000,00
37	1.3.2.05.01.05.077	0004	Papan Pengumuman	2.990.000,00
38	1.3.2.05.01.05.077	0005	Papan Pengumuman	2.990.000,00
39	1.3.2.05.01.05.077	0006	Papan Pengumuman	2.990.000,00
40	1.3.2.05.01.05.077	0007	Papan Pengumuman	2.990.000,00
41	1.3.2.05.01.05.077	0008	Papan Pengumuman	2.990.000,00
42	1.3.2.05.01.05.077	0009	Papan Pengumuman	2.990.000,00
43	1.3.2.05.01.05.077	0010	Papan Pengumuman	2.990.000,00
44	1.3.2.05.01.05.077	0011	Papan Pengumuman	2.990.000,00
45	1.3.2.10.02.03.003	0003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.363.000,00
46	1.3.2.10.02.03.003	0004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.363.000,00
47	1.3.2.05.01.05.077	0001	Papan Pengumuman	2.990.000,00
48	1.3.2.05.01.05.077	0002	Papan Pengumuman	2.990.000,00
49	1.3.2.05.01.05.077	0003	Papan Pengumuman	2.990.000,00
50	1.3.2.05.01.05.077	0004	Papan Pengumuman	2.990.000,00
51	1.3.2.05.01.05.077	0001	Papan Pengumuman	3.000.000,00
52	1.3.2.05.01.05.077	0002	Papan Pengumuman	3.000.000,00
53	1.3.2.05.01.05.077	0003	Papan Pengumuman	3.000.000,00
54	1.3.2.05.01.05.077	0004	Papan Pengumuman	3.000.000,00
55	1.3.2.05.01.05.077	0005	Papan Pengumuman	3.000.000,00
56	1.3.2.05.01.05.077	0006	Papan Pengumuman	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>128.332.925,00</b>





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**B. Pengurangan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp. 14.730.000,00**

Pengurangan Aset pada UPT.Perparkiran Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sebagai berikut :

**1. EKSTRACOMPTABLE Rp 14.730.000,00**

**Tabel 85 Rincian Pengurangan Aset Karena Ekstracomptable**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.06.02.01.006	00001	Handy Talky (HT)	973.000,00
2	1.3.2.06.02.01.006	00002	Handy Talky (HT)	973.000,00
3	1.3.2.06.02.01.006	00003	Handy Talky (HT)	973.000,00
4	1.3.2.06.02.01.006	00004	Handy Talky (HT)	973.000,00
5	1.3.2.06.02.01.006	00005	Handy Talky (HT)	973.000,00
6	1.3.2.06.02.01.006	00006	Handy Talky (HT)	973.000,00
7	1.3.2.06.02.01.006	00007	Handy Talky (HT)	973.000,00
8	1.3.2.06.02.01.006	00008	Handy Talky (HT)	973.000,00
9	1.3.2.06.02.01.006	00009	Handy Talky (HT)	973.000,00
10	1.3.2.06.02.01.006	00010	Handy Talky (HT)	973.000,00
11	1.3.2.06.02.01.006	0011	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
12	1.3.2.06.02.01.006	0012	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
13	1.3.2.06.02.01.006	0013	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
14	1.3.2.06.02.01.006	0014	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
15	1.3.2.06.02.01.006	0015	Handy Talky (HT)	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>14.730.000,00</b>

**5.3.2.2.2 Gedung dan Bangunan UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**59.800.000,00**

**0,00**

**Tabel 86 Rincian Gedung dan Bangunan UPT. Perparkiran**

No.	URAIAN		Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2022		0,00
2	Koreksi Kurang		0,00
3	Koreksi Tambah		0,00
4	Saldo Awal 2023		0,00
5	Penambahan :		
	a.	Belanja Modal 2023	59.800.000,00
	Jumlah Penambahan		59.800.000,00
6	Pengurangan :		0,00
	Jumlah Pengurangan		0,00
Saldo Per 31 Desember 2023			59.800.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**A. Penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 59.800.000,00 terdiri dari:**

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 59.800.000,00

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.3.01.01.01.002	0001	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	59.800.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>59.800.000,00</b>

**5.3.2.2.3 Akumulasi Penyusutan UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(193.940.441,70)**

**(112.879.828,42)**

**Tabel 87 Rincian Akumulasi Penyusutan UPT. Perparkiran**

No	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022	(112.879.828,42)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022	0
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022</b>	<b>(112.879.828,42)</b>
3	Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023	(79.352.042,28)
4	Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023	(1.708.571,00)
	<b>Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>(81.060.613,28)</b>
5	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023</b>		<b>(193.940.441,70)</b>

**5.3.2.3 Aset Tetap UPT. PKB**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.450.351.850,25**

**1.604.837.846,33**

Aset Tetap UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 1.450.351.850,25 terjadi Penurunan sebesar 9,63% atau sebesar Rp. 154.485.996,08 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 88 Tabel Rincian Aset Tetap UPT. PKB**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	2.303.229.559,26	2.127.699.559,26	175.530.000,00	8,25
Gedung dan Bangunan	1.156.669.950,00	1.087.259.950,00	69.410.000,00	6,38
Akumulasi Penyusutan	(2.009.547.659,01)	(1.610.121.662,93)	(399.425.996,08)	24,81
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.450.351.850,25</b>	<b>1.604.837.846,33</b>	<b>(154.485.996,08)</b>	<b>(9,63)</b>



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 5.3.2.3.1 Peralatan dan Mesin UPT. PKB

31 Desember 2023

(Rp)

2.303.229.559,26

31 Desember 2022

(Rp)

2.127.699.559,26

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.303.229.559,26 dan Rp 2.127.699.559,26. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 89 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin UPT. PKB**

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	ASET 2022	2.127.699.559,26
	Koreksi Catat 2023	-
A.	PENAMBAHAN :	175.530.000,00
1	Belanja Modal	175.530.000,00
B.	PENGURANGAN :	0,00
	ASET PER 31 DESEMBER 2023	2.303.229.559,26

#### A. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp 175.530.000,00

Penambahan Aset pada UPT Perparkiran pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Rp 175.530.000,00

**Tabel 90 Rincian Penambahan Aset Karena Belanja Modal**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.2.03.03.16.005	00001	Smoke Tester	175.530.000,00
Jumlah				175.530.000,00

### 5.3.2.3.2 Gedung dan Bangunan UPT. PKB

31 Desember 2023

(Rp)

1.156.669.950,00

31 Desember 2022

(Rp)

1.087.259.950,00

**Tabel 91 Tabel Rincian Gedung dan Bangunan UPT. PKB**

No.	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2022	1.087.259.950,00
2	Koreksi Kurang	0
3	Koreksi Tambah	0
4	Saldo Awal 2023	1.087.259.950,00
5	Penambahan :	
	a. Mutasi Antar SKPD	69.410.000,00
	Jumlah Penambahan	69.410.000,00
6	Pengurangan :	0
	Jumlah Pengurangan	0
Saldo Per 31 Desember 2023		1.156.669.950



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**A. Penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 69.410.000,00**

Penambahan Aset pada UPT PKB pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mutasi Antar SKPD Rp 69.410.000,00

**Tabel 92 Rincian Penambahan Aset Karena Mutasi Antar SKPD**

No	Kode		Uraian	Jumlah
1	1.3.3.01.01.01.001	00001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	69.410.000,00
Jumlah				<b>69.410.000,00</b>

**5.3.2.3.3 Akumulasi Penyusutan UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**(2.009.547.659,01)**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(1.610.121.662,93)**

**Tabel 93 Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap UPT. PKB**

No	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022	(1.412.850.679,18)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022	(197.270.983,75)
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022</b>	<b>(1.610.121.662,93)</b>
3	Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023	(368.310.080,08)
4	Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023	(31.115.916,00)
	<b>Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>(399.425.996,08)</b>
5	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023</b>		<b>(2.009.547.659,01)</b>

**5.3.3 Aset Lainnya**

**5.3.3.1 Aset Lainnya Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**0,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**0,00**

**5.3.3.2 Aset Lainnya UPT.Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**29.400.000,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**39.200.000,00**

Aset Lainnya UPT. Perparkiran pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 29.400.000,00 terjadi Penurunan sebesar 25% atau sebesar Rp. 39.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 94 Tabel Rincian Aset Lainnya UPT. Perparkiran**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Aset Tidak Berwujud Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(19.600.000,00)	(9.800.000,00)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>

**5.3.3.2.1 Aset Tak Berwujud UPT.Perparkiran**

**Tabel 95 Rincian Aset Tidak Berwujud UPT. Perparkiran**

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	1.5.3.01.01.05.001	Software.....	49.000.000,00

Tidak ada penambahan Aset pada Aset Tidak Berwujud UPT. Perparkiran

**5.3.3.2.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud UPT.Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**(19.600.000,00)**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(9.800.000,00)**

**Tabel 96 Tabel Amortisasi Aset Tidak Berwujud UPT. Perparkiran**

No.	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2022	(9.800.000,00)
2	Koreksi Kurang	0
3	Koreksi Tambah	0
4	Saldo Awal 2023	(9.800.000,00)
5	Penambahan :	
	a. Beban penyusutan	(9.800.000,00)
	Jumlah Penambahan	(9.800.000,00)
6	Pengurangan :	0
	Jumlah Pengurangan	0
	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>(19.600.000,00)</b>

**5.3.3.3 Aset Lainnya UPT. Pengujian Perbengkakan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**(145.460.000,00)**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(116.368.000,00)**

Aset Lainnya UPT. PKB pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 Dikarenakan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 97 Tabel Rincian Aset Lainnya UPT. PKB**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Aset Tidak Berwujud Lainnya	145.460.000,00	145.460.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(145.460.000,00)	(116.368.000,00)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092.000,00</b>

**5.3.3.3.1 Aset Tidak Berwujud UPT. PKB**

**Tabel 98 Rincian Aset Tidak Berwujud UPT. PKB**

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	1.5.3.01.01.05.001	Software.....	145.460.000,00

Tidak ada penambahan Aset pada Aset Lainnya UPT. PKB

**5.3.3.3.2 Amortisasi Aset Tidak Berwujud UPT. PKB**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(19.600.000,00)**

**(116.368.000,00)**

**Tabel 99 Tabel Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud UPT. PKB**

No.	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2022	(116.368.000,00)
2	Koreksi Kurang	0
3	Koreksi Tambah	0
4	Saldo Awal 2023	(116.368.000,00)
5	Penambahan :	
	a. Beban penyusutan	(29.092.000,00)
	Jumlah Penambahan	(29.092.000,00)
6	Pengurangan :	0
	Jumlah Pengurangan	0
	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>(145.460.000,00)</b>

**5.3.4 Kewajiban**

**5.3.4.1 Kewajiban Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**151.893.871,80**

**212.112.071,28**

Kewajiban Dinas Perhubungan terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang dapat dirincikan table berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.4.1.1 Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perhubungan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<b>151.893.871,80</b>	<b>212.112.071,28</b>

Terjadi penurunan kewajiban pada Dinas Perhubungan TA 2023 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp. 60.218.199,48 yang dirincikan pada table berikut:

**Tabel 100 Tabel Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan diterima Dimuka	91.551.176,80	178.431.492,28
2	Utang Belanja	60.342.695,00	33.680.579,00
	<b>Jumlah</b>	<b>151.893.871,80</b>	<b>212.112.071,28</b>

**5.3.4.1.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<b>91.551.176,80</b>	<b>178.431.492,28</b>

Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 91.551.176,80 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 101 Tabel Pendapatan Diterima Dimuka**

No.	Uraian	SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	91.551.176,80	178.431.492,28
	<b>Total</b>		<b>91.551.176,80</b>	<b>178.431.492,28</b>

**5.3.4.1.1.2 Utang Beban Dinas Perhubungan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<b>33.680.579,00</b>	<b>10.505.504,00</b>

**Tabel 102 Tabel Utang Beban**

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022
1	Utang Beban Pegawai	48.942.163,00	0,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	11.400.532,00	33.680.579,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.342.695,00</b>	<b>33.680.579,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Rincian utang beban dapat dilihat di table berikut:

**Tabel 103 Tabel Rincian Utang Beban**

No	Uraian	Tahun 2023
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	250.813,00
2	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	48.691.350,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.390.000,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	9.010.532,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.342.695,00</b>

**5.3.4.2 Kewajiban UPT.Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**0,00**

**0,00**

Pada TA 2023 Kewajiban dari UPT PKB adalah sebesar Nihil

**5.3.4.3 Kewajiban UPT.Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**0,00**

**0,00**

Pada TA 2023 Kewajiban dari UPT PKB adalah sebesar Nihil.

**5.3.5 Ekuitas Dana**

**5.3.5.1 Ekuitas Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**14.414.038.623,44**

**10.463.172.936,67**

**Tabel 104 Tabel Ekuitas Dinas Perhubungan**

No.	Uraian	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	10.463.172.936,67
	Surplus/Defisit-LO	(9.784.441.370,00)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
	- Koreksi Nilai Persediaan	0,00
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	13.735.307.056,77
	Ekuitas Akhir	14.414.038.623,44





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.3.5.2 Ekuitas UPT. Pengelolaan Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(1.347.913.230,99)**

**227.267.457,29**

**Tabel 105 Tabel Ekuitas UPT Pengelolaan Perparkiran**

No.	Uraian	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	227.267.457,29
	Surplus/Defisit-LO	(2.229.888.983,00)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
	- Koreksi Nilai Persediaan	0,00
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	654.708.294,72
	Ekuitas Akhir	(1.347.913.230,99)

**5.3.5.3 Ekuitas UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.289.251.688,25**

**1.646.429.846,33**

**Tabel 106 Tabel Ekuitas UPT. PKB**

No.	Uraian	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	1.289.251.688,25
	Surplus/Defisit-LO	(483.175.162,00)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
	- Koreksi Nilai Persediaan	0,00
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	483.175.162,00
	Ekuitas Akhir	1.289.251.688,25



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.4 LAPORAN OPERASIONAL**

**5.4.1 Pendapatan-LO**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**4.952.404.697,48**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.769.933.592,72**

**Tabel 107 Pendapatan LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	+/- (%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	2.797.998.997,48	1.769.933.592,72	58,08
2	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	2.154.405.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.952.404.697,48</b>	<b>1.769.933.592,72</b>	<b>179,81</b>

Pendapatan di Laporan Operasional lebih besar dari Pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran disebabkan oleh adanya beberapa tambahan dan pengurang yang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 108 Rincian Pendapatan LO**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan di LRA	2.738.117.732,00
2.	Pendapatan diterima dimuka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2022	178.431.492,28
3.	Pendapatan Hibah	2.154.405.700,00
4.	Pembayaran Piutang 2022	(29.599.050,00)
5.	Penambahan Piutang 2023	2.600.000,00
6.	Pendapatan diterima dimuka 2023	(91.551.176,80)
<b>Jumlah</b>		<b>4.952.404.697,48</b>

**5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.797.998.997,48**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.769.933.592,72**

**Tabel 109 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	+/- (%)
1	Retribusi Daerah-LO	2.790.747.851,48	1.768.991.092,72	57,76
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	7.251.146,00	942.500,00	669,35
<b>TOTAL</b>		<b>2.797.998.997,48</b>	<b>1.769.933.592,72</b>	<b>58,08</b>

Terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.028.065.404,76**.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.4.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.790.747.851,48**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.768.991.092,72**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp. **2.790.747.851,48** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 110 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	409.359.000,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	535.470.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LO	47.685.000,00
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	1.727.444.586,00
5.	Retribusi Izin Trayek-LO	10.908.000,00
6.	Balik Pendapatan Diterima Dimuka - Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	178.431.492,28
7.	Pend Diterima Dimuka - Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	(91.551.176,80)
8.	Pembayaran Piutang - Tempat Khusus Parkir-LO	(28.999.050,00)
9.	Piutang - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	2.600.000,00
10.	Pembayaran Piutang 2022 - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	(600.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.790.747.851,48</b>

**5.4.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**7.251.146,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**942.500,00**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dari Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar **Rp. 7.251.146,00**.

**Tabel 111 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	7.251.146,00	942.500,00	6.308.646,00	669,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7.251.146,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>6.308.646,00</b>	<b>669,35</b>

**5.4.1.2 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.154.405.700,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**0**

Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber sumber lain yang tidak bersifat rutin dan insidental, posisi Lain Lain Pendapatan daerah yang sah – LO Pemerintah.

**Tabel 112 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

No	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Nilai
1	Pendapatan Hibah – LO	2.154.405.700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.154.405.700,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.4.1.2.1 Pendapatan Hibah – LO**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**2.154.405.700,00**

**0**

Pendapatan hibah Dinas Perhubungan adalah berupa 3 mini bus dan 1 bus dari Pemerintah Pusat yang dirincikan pada table berikut:

**Tabel 113 Rincian Pendapatan Hibah-LO**

No	Uraian	Nilai
1	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	663.000.000,00
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	515.560.000,00
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	487.922.850,00
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	487.922.850,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.154.405.700,00</b>

**5.4.2 Beban-LO**

**5.4.2.1 Beban-LO Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**12.691.773.867,71**

**10.461.001.231,09**

**Tabel 114 Tabel Beban LO Dinas Perhubungan**

No	Uraian	2023	2022	+/-
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Operasi	12.691.773.867,71	10.461.001.231,09	21,32
<b>TOTAL</b>		<b>12.691.773.867,71</b>	<b>10.461.001.231,09</b>	<b>21,32</b>

**5.4.2.1.1 Beban Operasi Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**12.691.773.867,71**

**10.461.001.231,09**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 115 Rincian Beban Operasi Dinas Perhubungan**

No	Uraian	2023	2022	+/-
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	4.235.601.639,00	4.156.022.137,00	1,91
2	Beban Persediaan	2.267.618.485,00	1.731.879.450,00	30,93
3	Beban Jasa	2.734.479.879,00	2.417.276.929,00	13,12
4	Beban Pemeliharaan	289.053.000,00	413.676.685,00	(30,13)
5	Beban Perjalanan Dinas	703.631.145,00	388.166.225,00	81,27
6	Beban Penyisihan Piutang	48.795.375,00	84.636.500,00	(42,35)
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.412.594.344,71	1.269.343.305,09	90,07
<b>TOTAL</b>		<b>10.461.001.231,09</b>	<b>10.498.600.393,68</b>	<b>21,32</b>

**5.4.2.1.1.1 Beban Pegawai Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**4.235.601.639,00**

**4.156.022.137,00**

Beban Pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.235.601.639,00 Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut:

**Tabel 116 Rincian Beban Pegawai Dinas Perhubungan**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	2.491.519.608,00	2.445.668.218,00	-18.338.719,00	1,87%
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.588.333.031,00	1.624.802.306,00	330.545.834,00	-2,24%
3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	104.879.000,00	80.081.613,00	46.920.976,00	30,97%
4	Beban Honorarium	50.870.000,00	5.470.000,00	-140.000,00	829,98%
<b>TOTAL</b>		<b>4.235.601.639,00</b>	<b>3.797.034.046,00</b>	<b>358.988.091,00</b>	<b>1,91%</b>

Beban pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di LO berbeda dengan nilai Belanja Pegawai yang ada di LRA, hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 117 Rincian Beban Pegawai Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai di LRA	4.213.472.639,00
2	Penambahan Utang Insentif PAD Tahun 2023	48.942.163,00
3	Pembayaran Utang Insentif PAD Tahun 2022	-26.813.163,00
4	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Pegawai	0
<b>Nilai LO</b>		<b>4.235.601.639,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.4.2.1.1.2 Beban Persediaan Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.267.618.485,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.731.879.450,00**

**Tabel 118 Beban Persediaan Dinas Perhubungan**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	2.267.068.485,00	1.655.400.450,00	798.630.930,00	48,24%
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	76.479.000,00	(76.479.000,00)	-100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.267.068.485,00</b>	<b>1.731.879.450,00</b>	<b>722.151.930,00</b>	<b>41,70%</b>

Nilai Beban Bahan Pakai Habis Dinas Perhubungan di LO berbeda dengan nilai Belanja Barang Pakai Habis yang ada di LRA, hal tersebut dirincikan pada table berikut:

**Tabel 119 Rincian Beban Persediaan Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Barang Pakai Habis di LRA	2.454.031.380,00
2	Pembebanan Persediaan Tahun 2022	3.090.650,00
3	Penyesuaian Persediaan Tahun 2023	(190.053.545,00)
	<b>Nilai LO</b>	<b>2.267.068.485,00</b>

**5.4.2.1.1.3 Beban Jasa Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.734.479.879,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**2.417.276.929,00**

**Tabel 120 Beban Jasa Dinas Perhubungan**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	1.142.828.513,00	956.156.929,00	186.671.584,00	19,52%
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.741.366,00	0,00	27.741.366,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.559.410.000,00	1.461.120.000,00	98.290.000,00	6,73%
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.734.479.879,00</b>	<b>2.417.276.929,00</b>	<b>317.202.950,00</b>	<b>13,12%</b>

Nilai Beban Jasa Dinas Perhubungan di LO berbeda dengan nilai Belanja Jasa yang ada di LRA, perbedaan tersebut dirincikan pada table berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 121 Rincian Beban Jasa Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Jasa di LRA	2.729.946.763,00
2	Utang Beban Jasa Kantor Tahun 2023	11.400.532,00
3	Pembayaran Beban Jasa Kantor Tahun 2022	-6.867.416,00
	<b>Nilai LO</b>	<b>2.734.479.879,00</b>

**5.4.2.1.1.4 Beban Pemeliharaan Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**289.053.000,00**

**413.676.685,00**

**Tabel 122 Beban Pemeliharaan Dinas Perhubungan**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.133.000,00	277.233.800,00	-87.100.800,00	-31,42%
2	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	2.090.000,00	-2.090.000,00	-100,00%
3	Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98.920.000,00	134.352.885,00	-35.432.885,00	-26,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>413.676.685,00</b>	<b>413.676.685,00</b>	<b>(124.623.685,00)</b>	<b>-30,13%</b>

**5.4.2.1.1.5 Beban Perjalanan Dinas Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**703.631.145,00**

**388.166.225,00**

**Tabel 123 Beban Perjalanan Dinas Perhubungan**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas	703.631.145,00	388.166.225,00	315.464.920,00	81,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>703.631.145,00</b>	<b>388.166.225,00</b>	<b>315.464.920,00</b>	<b>81,27%</b>

**5.4.2.1.1.6 Beban Penyisihan Piutang**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**48.795.375,00**

**84.636.500,00**

**Tabel 124 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	+/- (%)
1	Penyisihan Piutang Retribusi	48.795.375,00	84.636.500,00	(42,35)
	<b>TOTAL</b>	<b>48.795.375,00</b>	<b>84.636.500,00</b>	<b>(42,35)</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.4.2.1.1.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi Dinas Perhubungan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.412.594.344,71**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.269.343.305,09**

**Tabel 125 Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perhubungan**

No	Uraian	Total
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.161.260.899,38
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	251.333.445,33
	<b>TOTAL</b>	<b>2.412.594.344,71</b>

**5.4.2.2 Beban-LO UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.130.822.121,28**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.452.668.176,00**

**Tabel 126 Beban Operasi UPT. Perparkiran**

No	Uraian	2023	2022	+/-
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Operasi	2.130.822.121,28	1.452.668.176,00	46,68
	<b>TOTAL</b>	<b>2.130.822.121,28</b>	<b>1.452.668.176,00</b>	<b>46,68</b>

**5.4.2.2.1 Beban Operasi UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**2.130.822.121,28**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.452.668.176,00**

**Tabel 127 Rincian Beban Operasi UPT. Perparkiran**

No	Uraian	2023	2022	+/-
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	1.530.000,00	2.040.000,00	(25,00)
2	Beban Persediaan	285.589.250,00	159.226.750,00	79,36
3	Beban Jasa	1.427.792.258,00	1.172.239.283,00	21,80
4	Beban Pemeliharaan	0,00	9.525.000,00	(100,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	325.050.000,00	40.925.686,00	694,24
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	90.860.613,28	68.711.457,00	32,24
	<b>TOTAL</b>	<b>2.130.822.121,28</b>	<b>1.452.668.176,00</b>	<b>21,32</b>





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.4.2.2.1.1 Beban Pegawai UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.530.000,00**

**2.040.000,00**

Beban Pegawai UPT. Perparkiran Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.530.000,00 Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut:

**Tabel 128 Rincian Beban Pegawai UPT. Perparkiran**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Honorarium	1.530.000,00	2.040.000,00	(510.000,00)	-25,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>(510.000,00)</b>	<b>-25,00</b>

**5.4.2.2.1.2 Beban Persediaan UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**285.589.250,00**

**159.226.750,00**

**Tabel 129 Beban Persediaan UPT. Perparkiran**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	285.589.250,00	159.226.750,00	798.630.930,00	48,24%
	<b>TOTAL</b>	<b>285.589.250,00</b>	<b>159.226.750,00</b>	<b>722.151.930,00</b>	<b>41,70%</b>

Nilai Beban Bahan Pakai Habis UPT. Perparkiran di LO berbeda dengan nilai Belanja Barang Pakai Habis yang ada di LRA, hal tersebut dirincikan pada table berikut:

**Tabel 130 Rincian Beban Persediaan UPT. Perparkiran**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Barang Pakai Habis di LRA	287.383.800,00
2	Pembebanan Persediaan Tahun 2022	6.390.000,00
3	Penyesuaian Persediaan Tahun 2023	(8.184.550,00)
	<b>Nilai LO</b>	<b>285.589.250,00</b>

**5.4.2.2.1.3 Beban Jasa UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.427.792.258,00**

**1.172.239.283,00**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 131 Beban Jasa UPT. Perparkiran**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	1.193.017.750,00	1.172.239.283,00	20.778.467,00	1,77
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	86.274.508,00	0,00	86.274.508,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	148.500.000,00	0,00	148.500.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.427.792.258,00</b>	<b>1.172.239.283,00</b>	<b>317.202.950,00</b>	<b>21,80</b>

**5.4.2.2.1.4 Beban Pemeliharaan UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**0,00**

**9.525.000,00**

**5.4.2.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**325.050.000,00**

**40.925.686,00**

**Tabel 132 Beban Perjalanan Dinas UPT. Perparkiran**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas	325.050.000,00	40.925.686,00	284.124.314,00	694,24
	<b>TOTAL</b>	<b>325.050.000,00</b>	<b>40.925.686,00</b>	<b>284.124.314,00</b>	<b>694,24</b>

**5.4.2.2.1.6 Beban Penyusutan Dan Amortisasi UPT. Perparkiran**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**90.860.613,28**

**68.711.457,00**

**Tabel 133 Beban Penyusutan dan Amortisasi UPT. Perparkiran**

No	Uraian	Total
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.352.042,28
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.708.571,00
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	9.800.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>90.860.613,28</b>

**5.4.2.3 Beban-LO UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**(Rp)**

**702.063.158,08**

**696.750.007,00**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 134 Beban Operasi UPT. PKB**

No	Uraian	2023	2022	+/-
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Operasi	702.063.158,08	696.750.007,00	0,76
<b>TOTAL</b>		<b>702.063.158,08</b>	<b>696.750.007,00</b>	<b>0,76</b>

**5.4.2.3.1 Beban Operasi UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**702.063.158,08**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**1.452.668.176,00**

**Tabel 135 Rincian Beban Operasi UPT. PKB**

No	Uraian	2023	2022	+/-
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Persediaan	103.865.000,00	159.226.750,00	79,36
2	Beban Jasa	83.625.000,00	1.172.239.283,00	21,80
3	Beban Pemeliharaan	69.000.000,00	9.525.000,00	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas	17.055.162,00	40.925.686,00	694,24
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	428.517.996,08	68.711.457,00	32,24
<b>TOTAL</b>		<b>702.063.158,08</b>	<b>1.452.668.176,00</b>	<b>21,32</b>

**5.4.2.3.1.1 Beban Persediaan UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**103.865.000,00**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**178.142.500,00**

**Tabel 136 Beban Persediaan UPT. PKB**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	103.865.000,00	178.142.500,00	(74.277.500,00)	(41,70)
<b>TOTAL</b>		<b>103.865.000,00</b>	<b>178.142.500,00</b>	<b>(74.277.500,00)</b>	<b>(41,70)</b>

Nilai Beban Bahan Pakai Habis UPT. Perparkiran di LO berbeda dengan nilai Belanja Barang Pakai Habis yang ada di LRA, hal tersebut dirincikan pada table berikut:

**Tabel 137 Rincian Beban Persediaan UPT. PKB**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Barang Pakai Habis di LRA	137.965.000,00
2	Pembebanan Persediaan Tahun 2022	12.500.000,00
3	Penyesuaian Persediaan Tahun 2023	-46.600.000,00
<b>Nilai LO</b>		<b>103.865.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.4.2.3.1.2 Beban Jasa UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

83.625.000,00

31.966.056,00

**Tabel 138 Beban Jasa UPT. PKB**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	41.625.000,00	31.966.056,00	9.658.944,00	30,22
2	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>83.625.000,00</b>	<b>1.172.239.283,00</b>	<b>51.658.944,00</b>	<b>161,61</b>

**5.4.2.3.1.3 Beban Pemeliharaan UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

69.000.000,00

57.500.000,00

**Tabel 139 Beban Pemeliharaan UPT. PKB**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.000.000,00	57.500.000,00	11.500.000,00	20,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>20,00%</b>

**5.4.2.3.1.4 Beban Perjalanan Dinas UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

17.055.162,00

7.726.200,00

**Tabel 140 Beban Perjalanan Dinas UPT. PKB**

No	Keterangan	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas	17.055.162,00	7.726.200,00	9.328.962,00	120,74
	<b>TOTAL</b>	<b>17.055.162,00</b>	<b>7.726.200,00</b>	<b>9.328.962,00</b>	<b>120,74</b>

**5.4.2.3.1.5 Beban Penyusutan Dan Amortisasi UPT. PPKB**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

428.517.996,08

421.415.251,00

**Tabel 141 Beban Penyusutan dan Amortisasi UPT. PKB**

No	Uraian	Total
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	368.310.080,08
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.115.916,00
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	29.092.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>428.517.996,08</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.4.3 Surplus/Defisit-LO**

**5.4.3.1 Surplus/Defisit-LO Dinas Perhubungan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(7.739.369.170,23)</u>	<u>(8.691.067.638,37)</u>

**Tabel 142 Surplus/Defisit-LO Dinas Perhubungan**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	+/- (%)
1	Pendapatan LO	4.952.404.697,48	1.769.933.592,72	35,74
2	Beban LO	(12.691.773.867,71)	(10.461.001.231,09)	82,42
<b>Jumlah</b>		<b>(7.739.369.170,23)</b>	<b>(8.691.067.638,37)</b>	<b>112,30</b>

**5.4.3.2 Surplus/Defisit-LO Dinas UPT. Perparkiran**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(2.130.822.121,28)</u>	<u>(1.452.668.176,00)</u>

**Tabel 143 Surplus/Defisit-LO UPT. Perparkiran**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	+/- (%)
1	Pendapatan LO	0,00	0,00	0,00
2	Beban LO	(2.130.822.121,28)	(1.452.668.176,00)	46,68
<b>Jumlah</b>		<b>(2.130.822.121,28)</b>	<b>(1.452.668.176,00)</b>	<b>46,68</b>

**5.4.3.3 Surplus/Defisit-LO Dinas UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(702.063.158,08)</u>	<u>(696.750.007,00)</u>

**Tabel 144 Surplus/Defisit-LO UPT. PKB**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	+/- (%)
1	Pendapatan LO	0,00	0,00	0,00
2	Beban LO	(702.063.158,08)	(696.750.007,00)	0,76
<b>Jumlah</b>		<b>(702.063.158,08)</b>	<b>(696.750.007,00)</b>	<b>0,76</b>



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 5.5 LAPORAN ARUS KAS

#### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023

(Rp)

(9.784.441.370,00)

31 Desember 2022

(Rp)

(8.445.204.013,00)

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas Operasional.

Pada tahun 2023 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp. (9.784.441.370,00) yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp. 2.738.117.732,00 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp. 12.522.559.102,00 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

**Tabel 145 Arus Kas Masuk Dinas Perhubungan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Retribusi Daerah	2.730.866.586,00	1.777.934.919,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.251.146,00	942.500,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.738.117.732,00</b>	<b>1.778.877.419,00</b>

Sedangkan arus kas keluar, dari arus keluar aktivitas operasi dapat dirincikan pada tabel berikut:

**Tabel 146 Arus Kas Keluar Dinas Perhubungan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pegawai	4.213.472.639,00	4.134.607.599,00
Pembayaran Barang	6.077.742.288,00	4.948.624.452,00
<b>JUMLAH</b>	<b>10.291.214.927,00</b>	<b>9.083.232.051,00</b>

**Tabel 147 Arus Kas Keluar UPT Perpajakan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pegawai	1.530.000,00	2.040.000,00
Pembayaran Barang	2.040.226.058,00	1.377.292.969,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.041.756.058,00</b>	<b>1.379.332.969,00</b>

**Tabel 148 Arus Kas Keluar UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Barang	307.645.162,00	262.728.811,00
<b>JUMLAH</b>	<b>307.645.162,00</b>	<b>262.728.811,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset non Keuangan**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**0**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**0**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp. 0,- merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp.0,- dan Arus Kas Keluar sebesar Rp.0,- Rincian aliran Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 149 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pencairan Dana Cadangan	0	0
Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sedangkan arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru

**Tabel 150 Arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Dinas Perhubungan**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	1.875.508.975,00	151.534.000,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	355.835.200,00	705.378.491,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	283.936.890,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>2.231.344.175,00</b>	<b>1.140.849.381,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(2.231.344.175,00)</b>	<b>(1.140.849.381,00)</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 151 Arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan UPT Perparkiran**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Perolehan Peralatan dan Mesin	128.332.925,00	119.030.000,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	59.800.000,00	0
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	0
Perolehan Aset Lainnya	-	49.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>188.132.925,00</b>	<b>168.030.000,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(188.132.925,00)</b>	<b>(168.030.000,00)</b>

**Tabel 152 Arus kas keluar Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan UPT PKB**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Perolehan Peralatan dan Mesin	175.530.000,00	0
Perolehan Bangunan dan Gedung	0	0
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0	0
Perolehan Aset Lainnya	0	0
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>175.530.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(175.530.000,00)</b>	<b>0</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**0**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**0**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp.0,- merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp. 0,-.

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**0**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**0**





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,- adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp.0,- dan Arus Kas Keluar sebesar Rp.0,-.

**5.5.5 Saldo Akhir Kas di BUD**

**31 Desember 2023**

**(Rp)**

**0**

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**0**

Saldo Akhir Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar sebesar Rp.0,-.

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya baik karena aktifitas di Lingkungan Kantor maupun karena perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi Nilai Ekuitas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

**Tabel 153 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERHUBUNGAN**

URAIAN	2023	2022
<b>1. EKUITAS AWAL</b>	<b>10.463.172.936,67</b>	<b>10.545.674.918,85</b>
<b>2. SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(7.739.369.170,23)</b>	<b>(8.691.067.638,37)</b>
<b>3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Kurang Catat Piutang	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	14.625.775,00	2.187.307,50
Koreksi Lebih Catat Piutang	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Aset	0,00	(2.800.000,00)
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset	97.150.000,00	264.692.344,01
Koreksi Kurang Catat Aset	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset	(310.200.000,00)	(513.008,32)
Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Mutasi Dana Tak Terduga	0,00	0,00
Mutasi Piutang Antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Penyisihan Piutang antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Persediaan	0,00	0,00
Mutasi Keluar Persediaan	0,00	0,00
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD	429.760.000,00	0,00
Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0,00	0,00
Mutasi Keluar Aset Antar SKPD	(166.560.000,00)	(100.205.000,00)
Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Extra	(26.200.000,00)	0,00
Reklasifikasi Aset Extra Menjadi Intra	0,00	0,00
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>11.651.659.082,00</b>	<b>10.002.661.093,00</b>
<b>4. EKUITAS AKHIR</b>	<b>14.414.038.623,44</b>	<b>12.020.630.016,67</b>

Ekuitas Awal Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp. 10.463.172.936,67, sedangkan nilai Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 14.414.038.623,44, terjadi kenaikan sebesar 37,76% atau sebesar 3.950.865.686,77. Hal tersebut dikarenakan adanya surplus/defisit LO sebesar Rp. (7.739.369.170,23) dan adanya koreksi Ekuitas sebesar Rp. 163.361.643,19, kemudian adanya kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 11.651.659.082,00.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 154 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UPT.PERPARKIRAN**

URAIAN	2023	2022
<b>1. EKUITAS AWAL</b>	<b>227.267.457,29</b>	<b>132.572.664,29</b>
<b>2. SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(2.130.822.121,28)</b>	<b>(1.452.668.176,00)</b>
<b>3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Kurang Catat Piutang	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Aset	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Aset	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Mutasi Dana Tak Terduga	0,00	0,00
Mutasi Piutang Antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Penyisihan Piutang antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Persediaan	0,00	0,00
Mutasi Keluar Persediaan	0,00	0,00
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0,00	0,00
Mutasi Keluar Aset Antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Extra	(14.730.000,00)	0,00
Reklasifikasi Aset Extra Menjadi Intra	0,00	0,00
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>570.371.433,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. EKUITAS AKHIR</b>	<b>(1.347.913.230,99)</b>	<b>(1.320.095.511,71)</b>

Ekuitas Awal UPT Perpustakaan adalah sebesar Rp 227.267.457,29, sedangkan nilai Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. (1.347.913.230,99), terjadi penurunan sebesar 693,10% atau sebesar Rp. (1.575.180.688,28). Hal tersebut dikarenakan adanya surplus/defisit LO sebesar Rp. (2.130.822.121,28), kemudian adanya kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 570.371.433,00.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 155 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

URAIAN	2023	2022
<b>1. EKUITAS AWAL</b>	<b>1.646.429.846,33</b>	<b>2.109.219.502,76</b>
<b>2. SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(702.063.158,08)</b>	<b>(696.750.007,00)</b>
<b>3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Tambah Nilai Kas	0,00	0,00
Koreksi Kurang Nilai Kas	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Aset	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset	0,00	323.539,57
Koreksi Kurang Catat Aset	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset	0,00	(29.092.000,00)
Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Mutasi Masuk Kas	0,00	0,00
Mutasi Keluar Kas	0,00	0,00
Mutasi Dana Tak Terduga	0,00	0,00
Mutasi Piutang Antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Penyisihan Piutang antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Persediaan	0,00	0,00
Mutasi Keluar Persediaan	0,00	0,00
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD	69.410.000,00	0,00
Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0,00	0,00
Mutasi Keluar Aset Antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Extra	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Extra Menjadi Intra	0,00	0,00
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>275.475.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.289.251.688,25</b>	<b>1.383.701.035,33</b>

Ekuitas Awal UPT PKB adalah sebesar Rp. 1.646.429.846,33, sedangkan nilai Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 1.289.251.688,25, terjadi penurunan sebesar 21,69% atau sebesar Rp. 357.178.158,08. Hal tersebut dikarenakan adanya surplus/defisit LO sebesar Rp. ((702.063.158,08)) dan adanya koreksi Ekuitas sebesar Mutasi Masuk Antar SKPD Rp. 69.410.000,00, kemudian adanya kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 275.475.000,00.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Dinas Perhubungan Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah *New Generation* (SIMDA-NG) atau *Financial Management Information System* (FMIS) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIKD. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**BAB VII**

**PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, Februari 2024  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru,

**Drs. ABDUL BASID, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700915 199101 1 001